Rencana Kerja 2024



DINSOSP3AKB KAB. SANGGAU

Email : dinsosp3akb@mail.sanggau.go.id

Website : www. Dinsosp3akb.sanggau.go.id

Kode Pos : 78512

Telp : (0564) 21035

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia serta perkenan-Nya Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Tahun 2024 dapat disusun dan diselesaikan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Rancangan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau ini merupakan tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024. Pada prinsipnya Rancangan Renja merupakan Dokumen Acuan Operasional pelaksanaan kegiatan Tahun 2024 yang dalam penyusunannya berdasarkan hasil Musrenbang RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2023 dan dibuat untuk diimplementasikan oleh seluruh Unit-unit kerja dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Tahun 2024 merupakan pelaksanaan teknis selama kurun waktu 1 (satu) tahun yang dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Kami menyadari bahwa Rencana Strategis ini tidak akan dapat tersusun tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Disadari bahwa Penyusunan Rancangan Renja ini masih jauh dari sempurna, tetapi kami berharap Rancangan Renja ini dapat digunakan sebagai tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau dalam upaya meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Akhirnya Semoga Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Tahun 2024 ini dapat dilaksanakan bagi peningkatan pelayanan prima terhadap masyarakat dalam rangka mewujudkan visi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak an Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau "**Pelayanan Sosial yang Berkualitas dan Berkeadilan, Kesetaraan Gender, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana menuju Keluarga yang Sejahtera"**.

Sanggau, Agustus 2023
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Kabupaten Sanggau

Drs. ALOYSIUS YANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640909 199412 1003

DAFTAR ISI

KataPengantar..... i

Daftar Isi..... ii

BAB I **Pendahuluan** 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 3

1.3. Maksud dan Tujuan 4

1.4. Sistematika Penulisan 5

BAB II **HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2022 DAN CAPAIAN KINERJA** 8

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Dinsosp3akb Kabupaten Sanggau Tahun lalu dan capaian Renstra Dinsosp3akb Kabupaten Sanggau 8

2.2 Analis kinerja pelayanan Dinsosp3akb Kabupaten Sanggau 55

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinsosp3akb Kabupaten Sanggau. 58

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD 60

2.5 Penelaahan usulan progran dan kegiatan masyarakat 79

BAB III **Tujuan, Sasaran dan Program Kegiatan** 81

3.1 Telahaan terhadap kebijakan Nasional 81

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinsosp3akb 87

3.3 Program dan Kegiatan 88

BAB IV **Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah** 93

BAB V **Penutup** 119

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah diketahui bahwa setiap perangkat daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja untuk tahun 2024. Dokumen Rencana Kerja atau yang biasa disingkat dan dikenal dengan istilah Renja merupakan dokumen perencanaan yang perangkat daerah dengan terlebih dahulu mengevaluasi realisasi target kinerja tahun sebelumnya dan melakukan proyeksi untuk tahun berikutnya. Dalam kenyataannya dokumen Renja haruslah seiring sejalan dengan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai dokumen referensi perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian dokumen Renja mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah begitu juga sebaliknya sehingga antara kedua dokumen dimaksud ada saling keterkaitan satu dengan yang lainnya. Dokumen Renja merupakan cikal bakal dari Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah dan dokumen Renja adalah acuan ketika menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang digunakan dalam proses pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dokumen Renja idealnya juga disusun dengan kajian terhadap dokumen Rencana Kerja Kementerian dan Lembaga serta dokumen Rencana Kerja Provinsi sehingga apa yang dilaksanakan di Kabupaten Sanggau linier dan memiliki kolerasi dengan program nasional dan program provinsi sehingga formulasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah memiliki sinergisitas sehingga memberikan ruang akselerasi implementasi kebijakan pembangunan berazaskan keadilan demi

kesejahteraan seluruh rakyat di Kabupaten Sanggau. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa keberadaan dokumen Rencana Kerja berada pada posisi yang sangat penting bagi perangkat daerah dalam menentukan arah kebijakan dan proyeksi anggaran. Dengan disusunnya dokumen Renja maka tahapan kebijakan yang dimulai dengan formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi menjadi optimal dalam upaya akselerasi program pembangunan. Untuk itu dipandang perlu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau menyusun dokumen Rencana Kerja untuk terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat, kesetaraan gender dan perlindungan anak serta keluarga berencana menuju keluarga yang sejahtera.

Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 diawali dengan pembentukan Tim Penyusun Renja, penyiapan data dan informasi, penyusunan rancangan awal, perumusan rancangan, verifikasi rancangan, perumusan rancangan akhir, verifikasi rancangan akhir, dan penetapan Renja melalui Peraturan Kepala Daerah. Program, kegiatan dan pagu indikatif yang termuat pada Renja harus selaras dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) begitu juga sebaliknya sehingga antara kedua dokumen dimaksud ada saling keterkaitan satu dengan yang lainnya

Dalam melaksanakan amanat undang-undang, peraturan pemerintah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Sanggau telah menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sanggau 2019-2024 yang disahkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2019.

RPJMD yang memuat : visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah terpilih; dan rancangan rencana teknokratik. RPJMD yang merupakan visi, misi dan program prioritas dari Kepala Daerah terpilih yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat daerah melalui program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD). Dinas Sosial,

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Sanggau telah melaksanakan penyusunan Rencana Strategis 2019-2024 sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Sanggau. Renstra yang telah ditetapkan ini akan dijadikan sebagai bahan perumusan rancangan untuk menyusun Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dan berfungsi sebagai koridor perencanaan kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif. Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) tahun 2024 ini memuat informasi tentang Sasaran, indikator kinerja, target pencapaian kinerja, kebutuhan Pagu indikatif, sumber dana dan prakiraan maju rencana tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau tahun 2019 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4725);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonessia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4817);

6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Stándar Teknis Pelayanan Dasar pada Stándar Pelayanan Minimal.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Menteri PPPA Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dari kekerasan berbasis Gender dalam Bencana.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Stándar Pelayanan Minimal
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikas, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2008 tentang tata cara Pembangunan Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024;
18. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau.
19. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 79 Tahun 2021 tentang Sususnan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya dokumen Rencana Awal Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Tahun 2024 ini adalah untuk merumuskan perencanaan pembangunan yang didalamnya memuat target kinerja, realisasi dan proyeksi. Tujuan disusunnya dokumen Rancangan Awal Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Tahun 2024 antara lain :

1. Memberikan arah yang jelas terhadap target kinerja, realisasi dan proyeksi perencanaan pembangunan;
2. Memberikan panduan dalam rangka membantu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau dalam mencapai serangkaian target kinerja, realisasi dan proyeksi perencanaan pembangunan;
3. Menyajikan dokumen sebagai salah satu pedoman dalam merumuskan formulasi kebijakan perencanaan pembangunan.

1.3.2.TUJUAN

Tujuan Penyusunan Ranwal Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Tahun 2024 diantaranya :

a. Memberikan arah yang jelas terhadap target kinerja, realisasi dan proyeksi perencanaan pembangunan.
b. Memberikan panduan dalam rangka membantu perangkat daerah mencapai serangkaian target kinerja, realisasi dan proyeksi perencanaan pembangunan.
c. Menyajikan dokumen sebagai salah satu referensi dalam merumuskan formulasi kebijakan perencanaan pembangunan.

1.4. SISTEMATIKA RENJA

Sistematika Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB. I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB. II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2019 DAN CAPAIAN KINERJA
- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Dinsosp3akb Kabupaten Sanggau Tahun lalu dan capaian Renstra Dinsosp3akb Kabupaten Sanggau
- 2.2 Analisis kinerja Pelayanan Dinsosp3akb Kabupaten Sanggau
- 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinsosp3akb Kabupaten Sanggau.
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan Masyarakat.

BAB. III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinsosp3akb

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINSOSP3AKAB KABUPATEN SANGGAU

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINSOSP3AKB KABUPATEN SANGGAU TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SANGGAU TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SANGGAU

Evaluasi merupakan tahapan penting dalam siklus kebijakan untuk menemukan dan memecahkan permasalahan dalam bentuk rekomendasi. Dengan melakukan evaluasi akan ditemukan kekeuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam implementasi kebijakan yang dalam hal ini terkait dengan target realisasi baik dari sisi serapan anggaran maupun kinerja perangkat daerah Dinsosp3akab.

Tujuan dari evaluasi pelaksanaan Renja Dinsosp3akb Kabupaten Sanggau adalah untuk melihat dan mengetahui proses yang terjadi dalam Pelaksanaan program kerja dan kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau tahun 2022 mengacu pada Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau 2019-2024 dimana Tahun 2022 merupakan Tahun ke-2 atau tahun kedua dari RPJMD 2019-2024. Evaluasi adalah suatu proses identifikasi untuk mengukur atau menilai apakah suatu kegiatan atau program yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan atau tujuan yang ingin dicapai. Evaluasi sangat dibutuhkan dalam perencanaan sehingga meningkatkan efektivitas dan produktivitas sehingga kita dapat mengetahui tingkat kemajuan suatu kegiatan, tingkat pencapaian suatu kegiatan sesuai dengan tujuan serta hal-hal yang harus dilakukan dimasa mendatang. Dengan demikian tujuan akhir dari evaluasi adalah untuk memperoleh masukan dalam bentuk rekomendasi dalam rangka memberikan masukan bagi proses dan tahapan kebijakan kedepan sehingga menjadi lebih berkualitas dan berintegritas.

Demikian dapat dimaknai secara umum Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2024 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional yang tertuang dalam Renstra Dinsosp3akb. Keberhasilan perencanaan dapat dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra Perangkat Daerah, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan. Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau pada Tahun 2024 memuat 15 (Lima Belas) program dan 35 (tiga puluh lima) dan 116 (Seratus Enam Belas) Sub kegiatan. Pada tahun anggaran 2023 sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 bahwa sesuai hasil pemetaan untuk tahun 2023 Sub kegiatan yang termasuk dalam SPM wajib untuk di anggarkan, jadi ada 17 (tujuh belas) penambahan sub kegiatan baru terkait SPM pada tahun anggaran 2023. Total alokasi anggaran Dinsosp3akb T.A 2022 sebelum Perubahan anggaran sebesar Rp. 18.983.346 403,- setelah perubahan anggaran sebesar Rp.21.483.345.391,- Penambahan anggaran terjadi pada saat APBD pergeseran setelah APBD Perubahan, dimana penambahan tersebut berasal dari Dana Insentif Daerah (DID) yang terdiri dari Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga sebesar Rp. 1.070.000.000, dimana pada Sub Kegiatan Mengakomodir untuk belanja Stimulan bangunan Rumah tidak layak huni sebanyak 82 RTLH. Serta Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan sebesar Rp. 1.430.000.000,- dimana anggaran tersebut dipergunakan untuk belanja bantuan sosial. Jadi jumlah penambahan anggaran Dana

Insentif daerah pada tahun anggaran APBD pergeseran setelah APBD perubahan adalah 2.500.000.000,-. Belanja Langsung dan Belanja DAK dengan rincian Realisasi sebagai berikut:

No	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Realisasi	%
1.	Belanja Operasi	18.983.346.403,-	21.483.345.391,-	13.080.827.647,77	86,18
TOTAL		18.983.346.403	21.483.345.391,-	16.026.696.501	86,18

Tahapan berikutnya diuraikan rangkaian pengukuran kinerja berdasarkan sasaran strategis jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya kemandirian PPKS

Sasaran 1 ditunjang dengan 6 (Enam) program yaitu Program Pemberdayaan Sosial, Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Penanganan Bencana dan Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan. Didukung dengan 8 (Delapan) kegiatan yaitu Kegiatan Pengembangan Potensi sumber kesejahteraan sosial daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal. Berikut capaian kinerja sasaran 1 tersaji pada table :

Sasaran	Program	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Kemandirian PPKS	**Indikator keluaran : Persentase PPKS yang mandiri**	**20,00%**		
	Program Pemberdayaan Sosial	**96,90 %**	**96,90%**	**100 %**
	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota	4 Lembaga	4 Lembaga	100 %
	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	**100 %**	**100%**	**100 %**
	Kegiatan Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal	200 Orang	200 Orang	100%
	Program	**100 %**	**100%**	**100 %**

	Rehabilitasi Sosial			
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial	2978 Orang	2978 orang	100%
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	150 Orang	150 Orang	100%
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	**100 %**	**100%**	**100 %**
	Pemeliharaan Anak-anak Terlantar	628 Orang	628 Orang	100 %
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dok	2 Dok	100%
	Program Penanganan	**100 %**	**100%**	**100%**

	Bencana			
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1200 orang	1200 orang	100%
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	**100 %**	**100 %**	**100 %**
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	3 TMP	3 TMP	100%

Indikator Kinerja Sasaran strategis 1 ini adalah :

- Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial
- Tingkat Angka Kemiskinan

Sedangkan untuk indikator program pada sasaran 1 ini adalah

1. Program Pemberdayaan Sosial

Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang mendapat pembinaan. Realisasi capaian indikator program Pemberdayaan Sosial adalah 96,90%. Yang berarti terpenuhinya semua target capaian yaitu terbinanya potensi sumber kesejahteraan sosial yang ada di Kabupaten Sanggau yang bertujuan meningkatkan Kesejahteraan hidup masyarakat Kabupaten Sanggau. Untuk program Pemberdayaan Sosial didukung oleh 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

- Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota dengan indikator sub kegiatan yaitu Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang dibina dengan target kinerja 16 orang TKSK.
- Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota dengan

indikator sub kegiatan yaitu Jumlah Lembaga sosial yang dibina dengan target kinerja 4 (empat) Lembaga sosial setiap tahunnya.

Kelembagaan Kesejahteraan Sosial memiliki indikator program yaitu Persentase Lembaga Kesejahteraan sosial yang dibina yang hanya memiliki satu kegiatan adalah Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial dengan indikator Keluaran Jumlah Lembaga Sosial yang mendapat pembinaan, sasaran kegiatan kelembagaan kesejahteraan sosial yang ada di Kabupaten sanggau dengan target kinerja tahun 2020 sebanyak empat lembaga. Berkaitan dengan aspek pembinaan terhadap keberadaan kelembagaan sosial seperti Karang Taruna, Yayasan Sosial termasuk didalamnya juga sinergi pemberdayaan TAGANA. Sampai dengan Tahun 2022 terdapat 160 Karang Taruna dan 10 Yayasan Sosial di Kabupaten Sanggau.

2. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, realisasi capaian indikator program ini adalah 100%. Yang berarti terpenuhinya semua target capaiannya yaitu 100%. Adapun indikator dari program tersebut adalah persentase warga negara migran yang terfasilitasi. Kegiatan Pelayanan dan Perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi dan perdagangan orang memiliki indikator keluaran yaitu jumlah pekerja eks migran/orang terlantar/trafficking yang tertangani dengan target sebanyak 2000 orang selama satu tahun, adapun yang menjadi sasaran kinerja yaitu pekerja eks migran dan orang terlantar yang ada di Kabupaten Sanggau dan menjadi Tanggung jawab Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau. Indikator hasil dari kegiatan pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi dan perdagangan orang yaitu Terpenuhinya jumlah pekerja eks migran/orang terlantar/ Trafficking yang tertangani. Pada tahun 2022 kegiatan pelayanan dan perlindungan sosial terealisasi sebesar 94,73%.

3. Program Rehabilitasi Sosial

Program Rehabilitasi Sosial dengan indikator program adalah persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang

terfasilitasi dengan target kinerja sebesar 100% dengan realisasi capaian indikator program sebesar 100% yang berarti terpenuhinya semua target capaian yaitu penyediaan permakanan, pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar serta gelandangan pengemis dan masyarakat serta pemberian layanan rujukan bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

- Penyediaan Permakanan

  Indikator keluaran dari kegiatan tersebut adalah jumlah lanjut usia terlantar yang memperoleh bantuan sosial. Lanjut usia terlantar yang memperoleh bantuan sosial adalah lanjut usia yang tidak memiliki penghasilan dan kehidupannya berada pada garis kemiskinan. Lanjut usia terlantar ini mendapat kan bantuan langsung yang difasilitasi oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau. Sehingga diharapkan dengan adanya bantuan sosial tersebut dapat meringankan kehidupan lansia tersebut. Untuk target kinerja Fasilitasi Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Terlantar memiliki target sebanyak 535 orang lanjut usia terlantar. Dengan indikator hasil dari kegiatan adalah Terpenuhinya jumlah lanjut usia terlantar yang memperoleh kebutuhan dasar dengan target 100%.

- Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar serta gelandang pengemis dan masyarakat.

  Fasilitasi Penerima Bantuan Sosial memiliki sasaran kegiatan yaitu Penyandang Disabilitas yang ada di Kabupaten Sanggau. Jumlah penerima bantuan sosial bagi penyandang disabilitas 245 orang untuk tahun 2022, berupa bantuan dana yang bersifat stimulan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar. Bantuan sosial yang diberikan 1 (satu) kali pertahun sejumlah Dua Juta Rupiah (Rp.2.000.000) serta bantuan sembako sejumlah 100 paket bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sanggau. Dalam

penyelenggaraan kegiatan ini dibantu Tenaga kerja Sosial Kecamatan (TKSK) yang bertanggung jawab di tiap kecamatan berjumlah 15 orang.

- Pemberian Layanan Rujukan

  Dengan indikator sub kegiatan yaitu 186 orang dengan gangguan jiwa yang ada di Kabupaten Sanggau. Penyandang Disabilitas dan penyakit kejiwaan di fasilitasi oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau untuk mendapatkan perawatan medis secara langsung di Rumah Sakit Jiwa Kota Singkawang dengan bantuan pembiayaan dari BPJS Kesehatan. Fasilitasi penyandang Disabilitas dan penyakit kejiwaan memiliki indikator keluaran yaitu Jumlah Orang yang sudah tertangani dengan indikator hasil Terpenuhinya orang dengan gangguan jiwa yang ditangani. Diharapkan dengan adanya kegiatan Fasilitasi penyandang Disabilitas dan penyakit kejiwaan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dapat memberikan kemudahan pada orang dengan gangguan jiwa yang memiliki keterbatasan biaya untuk berobat dapat difasilitasi hingga kembali pulih. Fasilitasi yang diberikan berupa melengkapi dokumen kependudukan serta syarat lainnya dalam rangka mengusulkan ODGJ mendapatkan jaminan kesehatan sebagai peserta PBI –ABPD, hingga fasilitasi ODGJ mendapatkan layanan perawatan dan pengobatan hingga resosialisasi ODGJ layak pulang ke keluarga.

4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

   Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan indikator program adalah Persentase Bantuan Sosial yang diberikan kepada masyarakat dengan target kinerja 90% dengan realisasi capaian program sebesar 90% yang berarti terpenuhinya semua target capaian pada 2 (dua) kegiatan yaitu Kegiatan Pemeliharaan Anak-anak Terlantar dengan satu sub kegiatan yaitu Pemantauan terhadap pelaksanaan

pemeliharaan anak terlantar dengan target indikator kinerja 9 Panti Asuhan yang mendapat pembinaan dan memberikan pelayanan kesehatan.

Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kegiatan Jumlah Dokumen Data Kemiskinan yang disusun dengan target 2 Dokumen dalam satu tahun.

- Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota memiliki Indikator Kinerja Program/Kegiatan yaitu Tersedianya Data Kemiskinan Kabupaten Sanggau dengan sasaran kegiatan yaitu jumlah penduduk miskin sebanyak 125.412 Penduduk Miskin (data ini bersifat fluktuatif tergantung hasil verifikasi dan validasi data DTKS melalui aplikasi SIK-NG. Pendataan penduduk miskin merupakan suatu keharusan bagi Pemerintah Daerah dikarenakan data ini akan menjadi tolak ukut untuk pelaksanaan bantuan sosial pemerintah pusat dan daerah serta titik tolak untuk pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat.
  Kegiatan pendataan penduduk miskin akan disinkronisasikan dengan data administrasi kependudukan. Untuk itu, maka telah dilakukan Perjanjian Kerjasama antara DINSOSP3AKB dengan DISDUKCAPIL Kabupaten Sanggau. Untuk pelaksanaan Pendataan Penduduk Miskin, juga bersinergi dengan pihak desa dan kelurahan melalui pemanfaatan Dana Desa untuk pengentasan kemiskinan dan perbaikan data penduduk miskin. Langkah yang sudah diambil adalah dengan memanfaatkan anggaran Dana Desa untuk membiayai Honorarium Petugas Operator Desa dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi data melalui program SIK-NG. Data kemiskinan harus selalu diupdate agar bantuan sosial dan jaminan kesehatan tepat sasaran dan tepat penerima.
- Sub kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 1 Dokumen. Pengelolaan Data Fakir Miskin Kabupaten Sanggau dituangkan dalam Aplikasi SIDOMPU, dengan adanya aplikasi SIDOMPU memberikan kemudahan dalam hal memverifikasi data kependudukan melalui

nomor induk kependudukan sehingga hasil verifikasi tersebut akan dimasukkan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

- Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahtreraan Keluarga

  Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dengan target kinerja 5 Jenis Bantuan yang diserahkan kepada masyarakat yaitu Bantuan Kube, Bantuan Rumah Tidak Layak Huni, Bantuan Sarana Lingkungan, Bantuan Pangan Non Tunai dan Bantuan Program Keluarga Harapan.

  - Fasilitasi Bantuan Pangan Non Tunai memiliki indikator kinerja program/kegiatan adalah Terlaksananya distribusi Rastra kepada penerima manfaat sebanyak 9.770 Keluarga penerima manfaat (KPM) dengan tingkat harga dan jumlah yang telah ditentukan pemerintah. Dengan sasaran kegiatan sebanyak 15 Kecamatan yang ada di Kabupaten Sanggau. Indikator hasil dari kegiatan tersebut adalah Terpenuhinya Distribusi Subsidi beras untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai sendiri Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana bekerjasama dengan Bulog untuk penyaluran Beras kepada Keluarga Penerima Manfaat serta bekerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) selaku Pihak Himbara (Himpunan Bank Negara) yang tersebar dibeberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Sanggau, selain itu kegiatan ini juga bekerjasama dengan supplier pihak ketiga yang turut membantu dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai tersebut berupa komoditi telur dan sembako. Penyaluran BPNT ini sendiri dilakukan menggunakan E-Warong untuk beberapa kecamatan yang telah memiliki jaringan internet sehingga dapat memudahkan keluarga penerima manfaat dalam menerima Bantuan Pangan Non Tunai. Pada tahun 2020 Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berubah nama menjadi Program Bantuan Sembako dengan jumlah bantuan sebesar

Rp.150.000,00 yang diserahkan kepada Keluarga Penerima Manfaat Berupa beras, telur serta protein hewani dan Protein Nabati.

- Fasilitasi Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program Nasional dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia yang berada pada garis kemiskinan. Program Keluarga Harapan ini memiliki sasaran Keluarga Penerima Manfaat pada tahun 2020 berjumlah 7.901 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Program Keluarga Harapan mempunyai Sumber Daya Manusia yang disebut pendamping PKH di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Sanggau yang bertugas mendampingi KPM PKH. Program Keluarga Harapan ini bersentuhan langsung kepada masyarakat karena bantuan diterima oleh KPM melalui transfer yang dikirim ke masing-masing rekening KPM PKH. Adapun yang menjadi indikator keluaran kegiatan Program Keluarga Harapan adalah Jumlah keluarga penerima manfaat serta yang menjadi Indikator Hasil adalah Terpenuhinya Jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang menerima bantuan. Besarnya bantuan yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat tidak sama dikarenakan setiap keluarga penerima manfaat memiliki kebutuhan yang berbeda.
- Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni memiliki indikator program yaitu Persentase Cakupan Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani. Untuk tahun 2020 Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni ditarget kan sebanyak 23,05 % selama setahun. Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni hanya memiliki satu kegiatan yaitu Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni yang memiliki indikator keluaran yaitu Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang di Rehabilitasi Sosial yang memiliki sasaran kinerja Rumah Tidak Layak Huni dan yang menjadi indikator hasil

adalah Terpenuhinya Rehabilitasi sosial Rumah Tidak Layak Huni dengan stimulant Bahan Bangunan Rumah. Kegiatan Rumah Tidak Layak Huni merupakan salah satu program unggulan yang dilaksanakan oleh DINSOSP3AKB Kabupaten Sanggau. Kegiatan RTLH disinergikan dengan Nilai DOMPU yang merupakan nilai kearifan lokal yang ada di Kabupaten Sanggau. Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni DOMPU dilaksanakan dengan asas gotong royong dan kerjasama antar semua pihak. Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau hanya memberikan bantuan stimulant berupa bahan bangunan kepada masyarakat miskin, sedangkan untuk pekerjaannya diharapkan adanya bantuan dari masyarakat dilokasi RTLH DOMPU dilaksanakan. Program RTLH telah dilaksanakan sejak Tahun 2017 dan untuk Tahun 2019 jumlah RTLH DOMPU dilaksanakan untuk 46 RTLH dan ditambah 1 RTLH bekerjasama dengan TNI (lokasi Desa Semanget Kecamatan Entikong). Sampai dengan Tahun 2019 jumlah proposal pengajuan bantuan RTLH sebanyak 1.167 buah dan untuk tahun 2020 yang dapat ditampung sebanyak 46 buah. Program RTLH ini dilaksanakan salah satu tujuannya adalah untuk pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sanggau.

- Sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat dengan target kinerja 6 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam satu tahun anggaran. Dengan indikator anggaran Jumlah Kelompok usaha bersama yang mendapatkan Bantuan pengembangan Ekonomi yang disediakan.

5. Program Penanganan Bencana

Penanggulangan korban bencana memiliki sasaran kegiatan yaitu Korban bencana yang mana indikator keluaran kegiatan tersebut adalah jumlah Penerima Bantuan Bencana serta indikator Hasilnya berupa Terpenuhinya jumlah penerima bantuan Bencana yang

ditangani yang memiliki target kegiatan sebanyak 300 korban bencana selama setahun. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang menjadi korban musibah bencana alam seperti banjir, kebakaran dan tanah longsor serta bencana sosial seperti kerusuhan, konflik sosial dan sebagainya. Bantuan yang diberikan berupa sandang dan pangan yang diharapkan dapat sedikit meringankan beban korban yang tertimpa musibah.

6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawana memiliki sasaran kegiatan Taman Makam Pahlawana yang memilliki target kinerja selama setahun adalah Tiga Taman Makam Pahlawan yang dipeliharan. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawanan ini juga diperuntukan untuk kegiatan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan. Ada 3 TMP yang harus dipelihara di Kabupaten Sanggau yaitu TMP Patriot Bangsa, TMP Pangsuma Meliau dan TMP Temenggung Gergaji Sekayam. Kegiatan ini perlu dukungan pembiayaan agar TMP tidak lagi dianggap lokasi yang kurang baik namun diarahkan bisa dijadikan sebagai lokasi wisata.

Sasaran 2 : Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender dan Anak

Sasaran 2 memiliki dua inkator kinerja yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Capaian Status Kabupaten Layak Anak (KLA), ditunjang dengan 5 (Lima) Program yaitu Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan; Program Perlindungan Perempuan; Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak; Program Pemenuhan Hak Anak (PHA); Program Perlindungan Khusus Anak dikdukung dengan 11 (sebelas) kegiatan yaitu Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintahan kewenangan Kabupaten/Kota; Pemberdayaan perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kabupaten/Kota;

Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota; Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan linkup daerah Kabupaten/Kota; Penyediaan layanan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota; Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota Bidang Pemberdayaan Perempuan. Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota; Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha kewenangan Kabupaten/Kota; Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota; Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten/Kota; Penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota; Bidang Perlindungan Anak. Berikut capaian Kinerja sasaran 2 tersaji pada tabel :

Sasaran	Program	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender dan Anak	**Indikator: Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Predikat Kabupaten /Kota Layak Anak (KLA)**	**61,65 Madya**	**61,65 Pratama**	**100% 50%**
	Program Pengarusutamaan Gender dan	**100 %**	**100%**	**100%**

	Pemberdayaan Perempuan			
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintahan kewenangan Kabupaten/Kota	28 Perangkat Daerah	28 Perangkat Daerah	100%
	Pemberdayaan perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dok	4 Dok	100%
	Program Perlindungan Perempuan	**100 %**	**100%**	**100%**
	Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan linkup daerah Kabupaten/Kota	3 Perangkat Dearah	3 Perangkat Dearah	100%
	Penyediaan layanan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan	25 Kasus	25 Kasus	100%

	koordinasi kewenangan kabupaten/kota			
	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	**100 %**	**100%**	**100%**
	Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota	3 Dok	3 Dok	100%
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	**70 %**	**70 %**	**100 %**
	Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha	1 Dok	1 Dok	100%

	kewenangan Kabupaten/Kota			
	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota	33 Lembaga	33 Lembaga	100%
	Program Perlindungan Khusus Anak	**100%**	**100%**	**100%**
	Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten/Kota	2 Dok	2 Dok	100%
	Penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota	2 Dok	2 Dok	100%

Dari sasaran strategis Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender merupakan sasaran strategis kedua dari Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan

Keluarga Berencana pada tahun 2019-2024. Sasaran strategis ini mempunyai indikator kinerja yaitu persentase peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) serta Indeks pembangunan Gender yang merupakan Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas. Sasaran strategis meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender memiliki Lima program yaitu:

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan indikator capaian program Persentase Dokumen Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan yang disusun dengan target indikator program 100%. Yang didukung oleh satu kegiatan yaitu kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintahan kewenangan Kabupaten/Kota dan satu sub kegiatan yaitu Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG.

   Dokumen Indikator Anugrah Parahita Ekapraya (APE) dengan indikator Hasil adalah Terpenuhinya penghargaan Anugrah Parahita Ekapraya (APE). Pada tahun 2020 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab. Sanggau akan mengikuti kegiatan Pengarusutamaan Gender (PUG) untuk mendapatkan penghargaan Anugrah Parahita Ekapraya (APE). Untuk dapat memperoleh penghargaan tersebut ada tujuh syarat Perencanaan Pengaggaran Responsif Gender (PPRG) dalam melaksanakan PUG. Adapun ketujuh prasyarat tersebut adalah :

No.	Komponen	Pelaksanaan
1.	Komitmen	Pejabatpengambil keputusan (peraturan tentang pelaksanaan PUG Pusat dan Daerah)
2.	Kebijakan	Adanya RPJMN/RPJMD yang responsive Gender
		Renstra Kementerian/Renstra Eselon 1/SKPD/OPD, Juklak, Juknis.
3.	Kelembagaan	Adanya Pokja PUG (termasuk 6

	(Lembaga)	Focal Point PUG)
		Adanya rencana tahunan Pokja PUG
		Adanya Laporan Tahunan Pokja PUG
4.	a. Sumber Daya Manusia	Tersedianya SDM yang telah mengikuti pelatihan (capacity buiding PUG/PPRG
		Tersedianya SDM yang sudah mengikuti TOT Fasilitator PUG/PPRG.
	b. Sumber Daya Anggaran	Adanya alokasi anggaran untuk (capacity buiding) PUG/PPRG
		Adanya ARG
5.	Alat Analisis Gender	Alat analisis gender yang digunakan (GAP, Harvard, dll)
6.	Data Gender	Tersedianya Statis gender/Profil gender/data terpilah.
7.	Peran serta masyarakat	Adanya lembaga masyarakat untuk mendukung pelaksanaan PUG

Untuk mendapat kan Anugrah Parahita Ekaparaya, maka ketujuh komponen tersebut harus terpenuhi.

penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam pembangunan memiliki sasaran kegiatan yaitu kaum perempuan Desa Fokus, Kampung KB, dan Desa Sampel KSI. Indikator keluaran darai kegiatan tersebut adalah Jumlah kaum perempuan Desa Fokus, Kampung KB dan Desa Sampel KSI yang mengikuti penyuluhan, Indikator hasilnya adalah Terpenuhinya kaum perempuan yang mengikuti penyuluhan. Kegiatan ini merupakan perwujudan dari komitmen yang tinggi dalam rangka peran perempuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, meningkatkan kesejahteraan keluarga tidak bisa lepas dari peran ibu rumah tangga, maka dari itu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau tetap melakukan penyuluhan untuk kemandirian menuju keluarga sejahtera. Untuk Kabupaten Sanggau sendiri kegiatan penyuluhan ibu rumah tangga untuk membangun keluarga sejahtera dilakukan dengan cara memberikan

penyuluhan seperti pembuatan olahan bahan pangan lokal sehingga dapat memiliki daya manfaat yang tinggi, sehingga dapat memberikan keterampilan bagi kaum perempuan terutama ibu rumah tangga yang di Desa Fokus, Kampung KB dan Desa Sampel KSI. Penyuluhan yang diberikan kepada Kaum perempuan khususnya ibu rumah tangga dengan target sebanyak 240 orang ibu rumah tangga selama satu tahun. Pada tahun 2019 kegiatan tersebut terealisasi besesar 94,28 %.

pemberdayaan Gender (IDG) dengan target sebesar 61,35 % sedangkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dengn target 80,55 %. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender dalam pembangunan memiliki 6 kegiatan untuk menunjang target capaian kinerja diatas. Indeks pembangunan Gender atau biasa yang dikenal dengan IPG adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui pembangunan manusia. IPG mengukur tingkat pencapaian kemampuan dasar manusia yang sama seperti IPM, yaitu harapan hidup, tingkat pendidikan dan pendapatan namun dengan memperhitungkan ketimpangan gender. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila angka IPG sama dengan IPM. Apabila angka IPG lebih rendah dari IPM maka terjadi kesenjangan gender. Kesenjangan gender dapat dilihat dari selisih antara IPM dan IPG, semakin kecil selisih antara IPM dan IPG maka dapat diartikan bahwa kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan juga semakin kecil. Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau memiliki enam kegiatan guna menunjang pertumbuhan IPG dan IDG.

pembinaan organisasi perempuan memiliki sasaran kinerja yaitu Organisasi perempuan yang ada di Kabupaten Sanggau dengan target kinerja sebanyak 40 Organisasi perempuan yang mendapat pembinaan. Adapaun yang menjadi indikator keluaran darin

kegiatan tersebut adalah jumlah organisasi perempuan yang mendapat pembinaan dan yang menjadi indikator hasil dari kegiatan tersebut adalah terpenuhinya organisasi perempuan yang mendapat pembinaan. Adapun yang menjadi tujuan diselenggarakannya kegiatan pembinaan organiasi perempuan adalah

a. Meningkatnya komitmen organisasi perempuan dalam program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan.
b. Meningkatnya kapasitas penguatan kelembagaan dan jejaring untuk optimalisasi pelaksanaan dibidang peningkatan kualitas hidup perempuan di Kabupaten Sanggau.

   Adapun hasil yang diharapkan dari kegiatan pembinaan organisasi perempuan adalah menggugah partisipasi perempuan Kabupaten Sanggau untuk meningkatkan kualitas hidupnya, dengan ikut ambil bagian dalam kemajuan pembangunan.

2. Program Perlindungan Perempuan

   Program perlindungan Perempuan memiliki indicator program yaitu Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani dengan target kinerja program sebesar 100%. Program tersebut memilki tiga kegiatan yaitu Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah Kabupaten/Kota di dukung dengan satu sub kegiatan Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota, Kegiatan Penyediaan layanan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota dengan satu sub kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota; kegiatan Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota didukung satu sub kegiatan Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan

kabupaten/kota. Tujuan dari program tersebut adalah untuk meminimalisir dan pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan. Sehingga perempuan terlindungi dan mendapat pendampingan hukum.

3. Program Pengelolaan Data Gender dan Anak

   Program Pengelolaan Data Gender dan Anak memiliki indicator program yaitu Persentase Dokumen Data Gender dan Anak tersusun dengan baik yang didukung oleh satu kegiatan yaitu Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota. Dan satu sub kegiatan yaitu Penyediaan data gender dan anak di kewenangan kabupaten/kota.

4. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

   Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) memiliki indikator program yaitu Persentase Dokumen Kabupaten Layak Anak yang tersusun dengan baik yang didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha kewenangan Kabupaten/Kota yang didukung oleh satu sub kegiatan yaitu Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan pemenuhan Hak anak kewenangan kabupaten/kota, dan kegiatan yang ke dua yaitu kegiatan Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota yang didukung oleh 2 (dua) sub kegiatan yaitu Penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota dan Pengembangan komunikasi, informasi dan Edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah Kabupaten/Kota.

5. Program Perlindungan Khusus Anak

Program Perlindungan Khusus Anak memiliki indikator Program yaitu Persentase kasus kekerasan anak tertangani yang didukung oleh dua kegiatan yaitu Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten/Kota yang didukung oleh satu sub kegiatan yaitu Koordinasi dan Sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan Kabupaten/Kota. Dan kegiatan yang ke dua yaitu kegiatan Penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota yang didukung oleh 4 (empat) sub kegiatan yaitu Penyedia layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah Kabupaten/Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten/Kota, Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten/Kota, Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten/Kota.

Kegiatan pelaksanaan sosialisasi yang terkait perlindungan anak dengan sasaran kegiatan kepala desa, kepala dusun, Tokoh Masyarakat, Guru, PKK Desa dan anak-anak. Kegiatan pelaksanaan sosialisasi yang terkait perlindungan anak ini bertujuan untuk menurunkan angka kekerasan dan pencabulan terhadap anak serta mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Untuk tahun 2022 ada tujun desa yang menjadi target kinerja kegiatan, dengan capaian kinerja sebanyak 83,03 %. Kegiatan pelaksanaan sosialisasi yang terkait perlindungan anak bertsentuhan langsung pada anak korban kekerasan atau pencabulan, sehingga anak korban kekerasan atau pencabulan mendapat perlindungan hukum yang langsung difasilitasi oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan

Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau hingga proses hukumnya selesai. Indicator keluaran dari kegitan tersebut adalah jumlah peserta sosialisasi terkait perlindungan anak dengan indikator hasil Terpenuhinya Desa yang telah berkomitmen layak anak.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Keberhasilan Ber KB

Sasaran	Program	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Keberhasilan Ber KB	**Indikator : Total Fertility Rate**	**2.21**	**2.21**	**100%**
	Program Pengendalian Penduduk	**2.22 Point**	**2.22 Point**	**100 %**
	Pemaduan dan Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	3 Dok	3 Dok	100%
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk	2 Dok	2 Dok	100%

	Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	**71,23 %**	**65,00 %**	**91,25 %**
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	6 Dok	6 Dok	100%
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	15 Orang	15 Orang	100%
	Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	33 Faskes	33 Faskes	100%
	Pemberdayaan	4 Dok	4 Dok	100%

	dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB			
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	**71,04 %**	**61,23 %**	**86,19 %**
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	12 Kelompok	12 Kelompok	100%
	Pelaksanaan dan peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan tingkat daerah Kabuapten/Kota dalam	1 Lap	1 Lap	100%

	pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			

Dari sasaran strategis meningkatnya penduduk yang ber KB memiliki sasaran indikator yaitu Total Fertility Rate dengan target 2,24 pertahun. pada sasaran strategis ini memiliki empat program dan memiliki delapan kegiatan untuk menunjang guna tercapainya Total Fertility Rate. Total Fertility rate ialah istilah yang digunakan dibidang Demografi untuk menggambarkan jumlah rata-rata anak yang terlahir dari seorang wanita sepanajng hidupnya bila ia akan mengalami tingkat kesuburan spesifik usia terkini yang pasti dan ia akan selamat dari kelahiran sepanjang reproduktifnya. Untuk target sasaran pada indikator sasaran strategis Total Fertility Rate adalah dengan treb angka yang menurun. Karena jika angka kelahiran menurun, maka Program Keluarga Berencana dianggap berhasil. Angka kelahiran menurut kelompok umur (Age Specific Fertility Rate/ASFR), ASFR 15-19 sebesar 38 berarti bahwa dalamsatu juta wanita 15-19 tahun secara rata-rata mempunyai 38 anak selama usia suburnya. Adapun empat program yang dapat mendukung tercapaianya sasaran strategis tersebut adalah :

1. **Program Pengendalian Penduduk**

   Program Keluarga Berencana dengan indikator kinerja yaitu persentase pasangan usia subur (PUS) menjadi peseta KB Aktif dengan taget kinerja pada tahun 2021 sebesar 66,23%. Program keluarga Berencana memiliki enam kegiatan yang empat kegiatannya bersumber dari dana DAU dan dua kegiatannya bersumber dari Dana DAK. Program Keluarga Berencana adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Itu bermakna adalah perencanaan

jumlah keluarga dengan pembatasan yang dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penaggulangan kelahiran seperti kondom, spiral, IUD dan sebagainya. Untuk menunjang program keluarga berencana memiliki enam kegiatan, adapun kegiatan tersebut adalah:

1) Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pengendalian kualitas penduduk.

   Kegiatan ini didukung oleh tiga sub kegiatan yaitu sub kegiatan penyerasian kebijakan pembangunan daerah Kabupaten/Kota terhadap kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK), Sub kegiatan penyusunan dan pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) tingkat Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan serta sub kegiatan Penguatan Kerjasama pelaksanaan Pendidikan kependudukan jalur pendididkan formal.

2) Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.

   Kegiatan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/kota didukung oleh lima sub kegiatan, dimana kelima sub kegiatan ini yang akan mendukung tercapaianya indikator kinerja pada kegiatan tersebut, Adapun kelima sub kegiatan tersebut adalah :

   1. Membentuk rumah data kependudukan di Kampung KB untuk memperkuat integritas Program KKBPK disektor lain.
   2. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan system informasi keluarga.
   3. Pencatatan dan pengumpulan data keluarga
   4. Pengelolaan dan peleporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB

5. Pembinaan dan pengawasan pencatatan dan pelaporan Program KKBPK.

2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program pembinaan keluarga berencana (KB) memiliki 4 (empat) kegiatan, dimana keempat kegiatan tersebut ada berasala Dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Adapun keempat kegiatan tersebut adalah :

1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal.

   Kegiatan pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan edukasi KB sesuai kearifan budaya lokal memiliki lima sub kegiatan yang menunjang tercapaianya capaian kinerja pada kegiatan tersebut. Adapun kelima sub kegiatan tersebut adalah :

   1) Advokasi program KKBPK kepada Steakholders dan mitra kerja.
   2) Promosi dan KIE Program KKBPK melalui media massa cetak dan Elektronik serta media luar ruang.
   3) Pelaksanaan mekanisme operasional program KKBPK melalui rapat koordinasi kecamatan (Rakorcam), Rapat koordinasi Desa (Rakordes) dan mini lokakarya (Mimilok).
   4) Pengelolaan operasional dan sarana di Balai penyuluhan KKBPK.
   5) Pengendalian Program KKBPK.

2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/petugas Lapangan KB (PKB/PLKB).

   Kegiatan Pendagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) didukung oleh satu sub kegiatan, dimana sub kegiatan tersebut di akomodir oleh Dana Alokasi Khusus (DAK). Adapun sub kegiatan

tersebut adalah sub kegiatan penggerakan Kader Institusi Masyarakat (IMP).

3. Pengendalian dan Pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota.

   Kegiatan pengendalian dan Pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah Kabupaten/Kota didukung oleh empat sub kegiatan untuk dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Adapun keempat sub kegiatan tersebut adalah:

   1) Pengendalian pendistribusian alat dan obat kontarsepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya.
   2) Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka Panjang (MKJP)
   3) Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB
   4) Pembinaan pelayanan keluarga berencana dan Kesehatan Reproduksi di fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya.

4. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.

   Kegiatan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB. Kegiatan ini didukung oleh tiga sub kegiatan dalam menunjang tercapaianya capaian kinerja program kegiatan. Adapun ketiga sub kegiatan tersebut adalah :

   1) Penguatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.

2) Integrasi pembangunan lintas sektor di kampung KB
3) Pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK di kampung KB.

3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) didukung oleh 2 (dua) kegiatan. Adapun dua kegiatan tersebut adalah :

1. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

   Kegiatan pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga didukung oleh lima sub kegiatan untuk memenuhi capaian kinerja program kegitan tersbut, dimana program kegiatan tersebut merupakan kegiatan pendukung terhadap program penurunan Stunting. Dimana kegiatan ini didukung oleh lima sub kegiatan untuk dapat menunjang tercapainya target kinerja pada kegiatan tersebut, Adapun kelima sub kegiatan tersebut adalah:

   1) Pembentukan kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan pemberdayaan ekonomi keluarga.
   2) Pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS).
   3) Penyediaan biaya operasional bagi pengelola dan pelaksana (kader) ketahanandan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS).

4) Penyediaan biaya operasional bagi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)
5) Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS).

2. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta Organisasi kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

   Kegiatan Pelaksanaan dan peningkatan peran serta Organisasi kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga didukung oleh satu sub kegiatan yaitu sub kegiatan Pendagunaan mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan dalam penggerakan Operasional pembinaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga /UPPKS).

   Adapun table Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab.Sanggau sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinsosp3akb dan Pencapaian Renstra Dinsosp3akb s/d Tahun 2022 Kabupaten Sanggau

Nama Perangkat Daerah : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. SANGGAU

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinsosp3akb Tahun 2024)	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Dinsosp3akb Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinsosp3akb s/d Tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8=(7/6)	(9)	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					DINSOSP3AKB KAB. SANGGAU									**22.440.431.264**
1	06				Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	OUTPUT								**12.885.424.552**
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan bidang urusan Sosial, Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**			**100%**	**7.328.387.021**
1	**06**	**01**	**2.01**		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun**	**12 Dokumen**	**12 Dokumen**	**12 Dokumen**	**12 Dokumen**	100	**12 Dokumen**	**12 Dokumen**	**73.998.798**
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	10.451.280
1	06	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	30.326.835
1	06	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	5.754.735
1	06	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	6.300.210
1	06	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	6.300.210
1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100	2 Laporan	2 Laporan	6.033.978
1	06	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100	4 Laporan	4 Laporan	8.831.550

1	**06**	**01**	**2.02**		**Administrasi dan Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun dan diverifikasi**	**30 Dokumen**	**30 Dokumen**	**30 Dokumen**	**30 Dokumen**		**30 Dokumen**		**5.960.535.299**
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang	38 Orang	38 Orang	38 Orang	100	38 Orang	38 Orang	3.569.760.156
1	06	01	2.02	02	Penyedia Administrasi Pelaksana tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	12 Dokumen	2.081.237.558
1	06	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	223.061.265
1	06	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	62.458.935
1	06	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	5.684.910
1	06	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	4.076.520
1	06	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	7.727.055
1	06	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	6.528.900
1	**06**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Barang Milik yang disusun**	**7 Dokumen**	**7 Dokumen**	**7 Dokumen**	**7 Dokumen**				**38.401.650**
1	06	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100		2 Dokumen	5.230.890
1	06	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100		2 Dokumen	5.889.870
1	06	01	2.03	06	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100		3 Laporan	27.280.890
1	**06**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian yang disusun**	**5 Dokumen**	**5 Dokumen**	**5 Dokumen**	**5 Dokumen**		**5 Dokumen**	**5 Dokumen**	**148.883.365**
1	06	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	63 paket	63 paket	63 paket	-	100	63 paket	63 paket	49.612.500
1	06	01	2.05	03	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100	2 Dok	2 Dok	3.198.930
1	06	01	2.05	04	Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100	2 Dok	2 Dok	6.419.805

1	06	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100	1 Dok	1 Dok	4.652.130
1	06	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	16 Orang	16 Orang	16 Orang	16 Orang	100	16 Orang	16 Orang	80.000.000
1	06	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	35 Orang	35 Orang	35 Orang	35 Orang	100	35 Orang	35 Orang	5.000.000
1	**06**	**01**	**2.06**		**ADMNISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**Jumlah Layanan Administrasi Umum yang disediakan**	**10 Jenis**	**10 Jenis**	**10 Jenis**	**10 Jenis**		**10 Jenis**	**10 Jenis**	**435.368.516**
1	06	01	2.06	01	Penyedian Komponen Instlasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	5 paket	5 paket	5 paket	100	5 paket	5 paket	6.119.916
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	10 Paket	10 Paket	100	10 Paket	10 Paket	115.853.000
1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100	12 Paket	12 Paket	72.795.000
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	8 Paket	8 Paket	100	8 Paket	8 Paket	30.000.000
1	06	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1095 Dokumen	1095 Dokumen	1095 Dokumen	1095 Dokumen	100	1095 Dokumen	1095 Dokumen	9.996.800
1	06	01	2.06	07	Penyediaan bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100	12 Paket	12 Paket	71.104.000
1	06	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	3.500.000
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	192 Laporan	192 Laporan	192 Laporan	192 Laporan	100	192 Laporan	192 Laporan	118.654.000
1	06	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100	5 Dokumen	5 Dokumen	5.345.800
1	06	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000
1	**06**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Dokuemn Pengadaan Barang Milik Daerah yang disusun**	**13 Unit**	**9 Unit**	**13 Unit**	**13 Unit**			**13 Unit**	**170.000.000**
1	06	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	0	0	0	-	1 Unit	1 Unit	130.000.000
1	06	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9 unit	9 unit	9 unit	9 unit	100	9 unit	9 unit	40.000.000

1	**06**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah layanan administrasi umum yang disediakan**	**3 Jenis**	**3 Jenis**	**3 Jenis**	**3 Jenis**			**3 Jenis**	**230.660.593**
1	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	256 Laporan	256 Laporan	256 Laporan	256 Laporan	100	256 Laporan	256 Laporan	2.750.000
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	106.994.053
1	06	01	2.08	04	Penyedian Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	120.916.540
1	**06**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Layanan Administrasi Umum yang disediakan**	**41 Unit**	**41 Unit**	**41 Unit**	**41 Unit**			**3 Jenis**	**270.538.800**
1	06	01	2.09	01	Penyedian Jasa Pemeliharan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	100	10 Unit	10 Unit	114.450.000
1	06	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	40 Unit	40 Unit	40 Unit	100	40 Unit	94 Unit	44.100.000
1	06	01	2.09	09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	1 Unit	111.988.800
					URUSAN SOSIAL									**5.557.037.531**
1	**06**	**02**			**PROGRAM PEMBEREDAYAAN SOSIAL**	**Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang mendapat pembinaan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**			**464.070.705**
1	**06**	**02**	**2.03**		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota**	**Jumlah lembaga sosial yang ada di Kabupaten Sanggau yang mendapat pembinaan**	**4 Lembaga**	**4 Lembaga**	**4 Lembaga**	**4 Lembaga**	**100%**		**4 Lembaga**	**464.070.705**
1	06	02	2.03	02	Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	16 Orang	16 Orang	16 Orang	16 Orang	100	16 Orang	16 Orang	142.124.955
1	06	02	2.03	04	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	100	4 Lembaga	4 Lembaga	132.231.750
1	06	02	2.03	05	Peningkatan kemampuan sumber daya manuasi dan penguatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Sertifikat	0	0	0	-	1 Sertifikat	1 Sertifikat	189.714.000
1	**06**	**03**			**PROGRAM PENANGANAN WARGA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	**Persentase Warga Negara Migran yang difasilitasi**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**				**35.000.000**
1	**06**	**03**	**2.01**		**Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal**	**Jumlah Dokumen Pemulangan Warga Negara Migran yang terfasilitasi**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**			**DAU**	**35.000.000**

1	06	03	2.01	01	Fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Kabupaten Kota untuk dipulangkan ke Desa / Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	100	200 Orang	200 Orang	35.000.000
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase PMKS Yang tertangani**	**100%**	-	-	-				**2.754.253.158**
1	**06**	**04**	**2.01**		**Rehabilitasi Sosial dasar penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial**	**Jumlah PMKS yang tertangani**	**795 Orang**	-	-	-		**795 Orang**	**795 Orang**	**2.735.947.700**
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	425 Orang	-	-	-		425 Orang	425 Orang	1.037.728.981
1	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan Kabupaten/kota	471 Orang	-	-	-		471 Orang	471 Orang	50.000.009
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang mendapatkan Alat Bantu Peraga sesuai Kebetuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	-	-	-		20 Orang	20 Orang	50.000.064
1	06	04	2.01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	-	-	-		30 Orang	30 Orang	19.999.993
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang	-	-	-		250 Orang	250 Orang	9.999.982
1	06	04	2.01	06	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar serta gelandang pengemis dan masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	560 Orang	-	-	-		560 Orang	560 Orang	1.191.218.922
1	06	04	2.01	07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan , Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Akta Kelahiran, Surat nikah dan Kartu Identitas Anak bagi penyandang Disabilitas kewenangan Kabupaten/Kota.	20 Orang	-	-	-		20 Orang	20 Orang	15.000.053
1	06	04	2.01	08	Pemberian Akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang mendapatkan Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan Dasar kewenangan Kabupaten/Kota	141 Orang	-	-	-		141 Orang	141 Orang	19.999.786
1	06	04	2.01	09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota	560 Orang	-	-	-		560 Orang	560 Orang	20.000.094
1	06	04	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	-	-	-		10 Orang	10 Orang	59.999.854
1	06	04	2.01	11	Pemberian Pelayanan Penelurusan Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	-	-	-		75 Orang	75 Orang	9.999.943
1	06	04	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	370 Orang	-	-	-		370 Orang	370 Orang	252.000.019
1	06	04	2.02		**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**									**18.305.458**
1	06	04	2.02	01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota	50 Orang	-	50 Orang	50 Orang	100	50 Orang	50 Orang	4.300.010
1	06	04	2.02	05	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang mendapatkan Alat Bantu Peraga sesuai Kebetuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	-	50 Orang	50 Orang	100	50 Orang	50 Orang	9.605.255

1	06	04	2.02	08	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	-	50 Orang	50 Orang	100	50 Orang	50 Orang	4.400.193
1	**06**	**05**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase Bantuan Sosial yang diberikan kepada masyarakat**	**90%**	**90%**	**90%**	**90%**			**9 Panti**	**1.978.819.302**
1	**06**	**05**	**2.01**		**Pemeliharaan Anak-anak Terlantar**	**Jumlah Panti Asuhan yang mendapatkan Bantuan**	**628 Orang**	**608 Orang**	**628 Orang**	**628 Orang**		**628 Orang**	**628 Orang**	**270.094.702**
1	06	05	2.01	01	Penjangkauan Anak-anak Terlantar	Jumlah Anak-anak terlantar yang dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	-	-	-	-	10 Orang	10 Orang	-
1	06	05	2.01	02	Rujukan Anak-anak Terlantar	Jumlah Anak-anak terlantar yang mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	-	-	-	-	10 Orang	10 Orang	-
1	06	05	2.01	03	Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	608 Orang	608 Orang	608 Orang	608 Orang	100	608 Orang	607 Orang	270.094.702
1	**06**	**05**	**2.02**		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Data Kemiskinan yang disusun**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**			**2 Dokumen**	**1.708.724.600**
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	195.092 Orang	195.092 Orang	195.092 Orang	195.092 Orang	100	195.092 Orang	195.092 Orang	949.881.600
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	49.957 Keluarga	49.957 Keluarga	49.957 Keluarga	49.957 Keluarga	100	49.957 Keluarga	49.957 Keluarga	120.000.000
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	125.448 Keluarga	125.448 Keluarga	125.448 Keluarga	125.448 Keluarga	100	125.448 Keluarga	125.448 Keluarga	528.196.000
1	06	05	2.02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Orang	6 Orang	6 Orang	6 Orang	100	6 Orang	6 Orang	110.647.000
1	**06**	**06**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan Bantuan**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**				**282.933.856**
1	**06**	**06**	**2.01**		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Jumlah penerima bantuan bencana alam/sosial yang menerima makanan yang disediakan**	**150 Orang**	**150 Orang**	**150 Orang**	**150 Orang**		**150 Orang**	**150 Orang**	**108.716.928**
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah penerima bantuan bencana alam/sosial yang menerima makanan yang disediakan	75 Orang	75 Orang	75 Orang	75 Orang	100	75 Orang	75 Orang	97.224.524
1	06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah penerima bantuan bencana alam/sosial yang menerima makanan yang disediakan	75 Orang	75 Orang	75 Orang	75 Orang	100	75 Orang	75 Orang	11.492.404
1	06	06	2.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	100	15 Unit	15 Unit	25.000.000

1	06	06	2.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	115 Orang	115 Orang	115 Orang	115 Orang	100	115 Orang	115 Orang	25.000.000
1	06	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	115 Orang	115 Orang	115 Orang	115 Orang	100	115 Orang	115 Orang	15.500.000
1	**06**	**06**	**2.02**		**Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota**	**Jumlah kelurahan yang dibentuk menjadi kampung siaga bencana**	-	**1 Kelurahan**	**1 Kelurahan**	**1 Kelurahan**				**9.255.620**
1	06	06	2.02	01	Koordinasi sosialisasi dan pelaksanaan kampung siaga bencana	Jumlah kelurahan yang dibentuk menjadi kampung siaga bencana	-	1 Kampung	1 Kampung	1 Kampung	100	-	-	3.021.620
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosilaisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Taruna Siaga Bencana yang Mendapat Pembinaan	-	46 Orang	46 Orang	46 Orang	100	-	-	6.234.000
1	**06**	**07**			**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**				**41.960.510**
1	**06**	**07**	**2.01**		**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang di pelihara**	**3 TMP**	**3 TMP**	**3 TMP**	**3 TMP**		**3 TMP**	**3 TMP**	**41.960.510**
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	3 TMP	3 TMP	3 TMP	3 TMP	100	3 TMP	3 TMP	41.960.510
2	**08**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**									**2.026.559.594**
2	**08**	**02**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase Dokumen Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan yang disusun**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**				**1.253.988.459**
2	**08**	**02**	**2.01**		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintahan kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen penyusunan indikator APE**	**28 Perangkat Daerah**	**28 Perangkat Daerah**	**28 Perangkat Daerah**	**28 Perangkat Daerah**			**3 Dokumen**	**41.950.510**
2	08	02	2.01	03	Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	28 Perangkat Daerah	28 Perangkat Daerah	28 Perangkat Daerah	28 Perangkat Daerah	100	28 Perangkat Daerah	28 Perangkat Daerah	41.950.510
2	**08**	**02**	**2.02**		**Pemberdayaan perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Pembinaan terhadap Kaum Perempuan yang disusun**	**4 Dokumen**	**4 Dokumen**	**4 Dokumen**	**4 Dokumen**		**4 Dokumen**	**4 Dokumen**	**74.825.594**

2	08	02	2.02	01	Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	20.806.319
2	08	02	2.02	02	Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik hukum sosial dan ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Organisasi	2 Organisasi	2 Organisasi	2 Organisasi	100	2 Organisasi	2 Organisasi	54.019.275
2	**08**	**02**	**2.03**		**Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota**	**Jumlah Dokumen Penguatan dan Pengembangan Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang disusun**	**4 Dokumen**	**4 Dokumen**	**4 Dokumen**	**4 Dokumen**		**4 Dokumen**	**4 Dokumen**	**1.137.212.355**
2	08	02	2.03	01	Advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	31 Lembaga	31 Lembaga	31 Lembaga	31 Lembaga	100	31 Lembaga	31 Lembaga	1.053.832.900
2	08	02	2.03	02	Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	100	200 Orang	200 Orang	41.511.444
2	08	02	2.03	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	41.868.011
2	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**				**126.612.849**
2	**08**	**03**	**2.01**		**Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan linkup daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani**	3 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah		3 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	**64.715.484**
2	08	03	2.01	02	Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	100	3 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	64.715.484
2	**08**	**03**	**2.02**		**Penyediaan layanan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota**	**Jumlah kasus terhadap perempuan yang tertangani**	25 Orang	25 Orang	25 Orang	25 Orang		25 Orang	25 Orang	**29.270.400**
2	08	03	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Korban kekerasan tingkat Kabupaten/Kota yang mendapat layanan pengaduan	25 Orang	25 Orang	25 Orang	25 Orang	100	25 Orang	25 Orang	29.270.400

2	**08**	**03**	**2.03**		**Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota**	**Jumlah Dokumen kesepakatan bersama antar jejaring yang disepakati**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**		**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**32.626.965**
2	08	03	2.03	03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	100 Orang	-	-	-			-	-
2	08	03	2.03	04	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	32.626.965
2	**08**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Persentase Dokumen Data Gender dan Anak tersusun dengan baik**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**				**141.272.112**
2	**08**	**05**	**2.01**		**Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota**	**Jumlah Dokumen pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak yang disusun**	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	**141.272.112**
2	08	05	2.01	01	Penyediaan data gender dan anak di kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang tersedia	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	81.272.112
2	08	05	2.01	02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	-	-	-	-	2 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000
2	**08**	**06**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Persentase Dokumen Kabupaten Layak Anak yang tersusun dengan baik**	**70%**	**70%**	**70%**	**70%**				**289.211.670**
2	**08**	**06**	**2.01**		**Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Pencapaian Indikator Kabupaten Layak anak yang disusun**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**		**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**85.459.430**
2	08	06	2.01	01	Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan Hak anak pada lembaga pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintahan, Non Pemerintahan, Media dan Dunia Usaha yang mendapat Advokasi kebijakan dan pendampingan Pemenuhan Haka Anak pada organisasi Pemerintahan, Non Pemerintahan Media dan Dunia Usaha	47 Organisasi	-	-	-	-	47 Organisasi	47 Organisasi	35.000.000
2	08	06	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan pemenuhan Hak anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Pencapaian Indikator Kabupaten Layak anak yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	50.459.430
2	**08**	**06**	**2.02**		**Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Lembaga Penyedia layanan Kualitas hidup anak yang tersedia**	**33 Lembaga**	**33 Lembaga**	**33 Lembaga**	**33 Lembaga**		**33 Lembaga**	**33 Lembaga**	**203.752.240**
2	08	06	2.02	01	Penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan yang mendukung peringatan dalam pengembangan kualitas hidup anak	360 Orang	360 Orang	360 Orang	360 Orang	100	360 Orang	360 Orang	38.416.770

2	08	06	2.02	03	Pengembangan komunikasi, informasi dan Edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta forum anak daerah tingkat Kabupaten, kecamatan, Desa/Kelurahan yang dibina	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	110.335.470
2	08	06	2.02	04	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil penguatan jejaring antar Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas Hidup anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	55.000.000
2	**08**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase kasus kekerasan anak tertangani**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**				**215.474.504**
2	**08**	**07**	**2.01**		**Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	**59.963.310**
2	08	07	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	59.963.310
2	**08**	**07**	**2.02**		**Penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota**	**Jumlah Dokumen Layanan bagi anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang disusun**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**		**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**155.511.194**
2	08	07	2.02	01	Penyedia layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang	12 Orang	12 Orang	12 Orang	100	12 Orang	12 Orang	45.976.386
2	08	07	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	Layanan	Layanan	Layanan	100	Layanan	Layanan	40.882.538
2	08	07	2.02	03	Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Masyarakat	Masyarakat	Masyarakat	Masyarakat	100	Masyarakat	Masyarakat	63.532.070
2	08	07	2.02	04	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memelukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	5.120.200
2	**14**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**									**7.528.447.118**
2	**14**	**02**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Total Fertility Rate (TFR)**	**2.22 point**	**2.22 point**	**2.22 point**	**2.22 point**				**382.901.121**
2	**14**	**02**	**2.01**		**Pemaduan dan Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**Jumlah Dokumen Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah yang tersusun dengan baik**	**3 Dokumen**	**3 Dokumen**	**3 Dokumen**	**2 Dokumen**			**3 Dokumen**	**63.111.700**

2	14	02	2.01	01	Penyerasian kebijakan pembangunan daerah Kabupaten/Kota terhadap kependudukan , keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan keluarga Berencana)	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	-		-	2 Dokumen	6.930.000
2	14	02	2.01	02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten / Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	45.870.000
2	14	02	2.01	05	Penguatan kerjasama pelaksana pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	10.311.700
2	**14**	**02**	**2.02**		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Pemetaan Pengendalian Penduduk**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**		**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**319.789.421**
2	14	02	2.02	08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk memperkuat integrasi Program KKBPK di Sektor lain.	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor lain yang dibentuk.	2 Unit	2 Unit	2 Unit	-	-	2 Unit	2 Unit	2.880.000
				09	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sistem informasi keluarga	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sistem informasi keluarga	1 Laporan	-	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	64.199.421
2	14	02	2.01	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang tersedia	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	72.679.870
				12	Pencatatan danpengumpulan data keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang tersedia	2 Dokumen	-	-	-		2 Dokumen	2 Dokumen	141.000.000
2	14	02	2.01	13	Pengelolaan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	111.710.000
2	14	02	2.01	14	Pembinaan dan pengawasan pencatatan dan pelaporan program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	531.652
2	**14**	**03**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Persentase pasangan usia subur (PUS) menjadi peserta kb aktif**	**71,23%**	**71,23%**	**71,23%**	**71,23%**				**4.457.474.807**
2	**14**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal**	**Jumlah Dokumen Advokasi KIE Pengendalian Penduduk dan KB**	**6 Dokumen**	**6 Dokumen**	**6 Dokumen**	**6 Dokumen**			**6 Dokumen**	**828.901.206**
2	14	03	2.01	01	Advokasi Program KKBPK Kepada Steakholder dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4 Organisasi	4 Organisasi	4 Organisasi	4 Organisasi	100	4 Organisasi	4 Organisasi	4.360.000

2	14	03	2.01	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	24.565.410
2	14	03	2.01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK melalui media masa cetak dan elektronik serta media luar ruang	Jumlah penyuluhan promosi KIE program KKBPK melalui media masa cetak dan elektronik serta media luar ruang	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	100	6 Unit	6 Unit	75.975.796
2	14	03	2.01	06	Pelaksanaan mekanisme operasional program KKBPK melalui rapat koordinasi kecamatan (Rakorcam), rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan mini lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	234.500.000
2	14	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	489.500.000
2	14	03	2.01	08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBP	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	39.990.000
2	**14**	**03**	**2.02**		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Jumlah Kader IMP yang dibina**	**15 Orang**	**15 Orang**	**15 Orang**	**15 Orang**		**15 Orang**	**15 Orang**	**811.200.000**
2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Instituisi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	15 Orang	15 Orang	15 Orang	15 Orang	100	15 Orang	15 Orang	811.200.000
2	**14**	**03**	**2.03**		**Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Faskes yang mendapat pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi**	**33 faskes**	**33 faskes**	**33 faskes**	**33 faskes**		**33 faskes**	**33 faskes**	**1.072.638.981**
2	14	03	2.03	01	Pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	13.581.081
2	14	03	2.03	03	Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontasepsi jangka panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	12.709 Orang	12.709 Orang	12.709 Orang	12.709 Orang	100	12.709 Orang	12.709 Orang	150.438.900
2	14	03	2.03	06	Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	100	15 Unit	15 Unit	896.619.000

2	14	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya.	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	12.000.000
2	**14**	**03**	**2.04**		**Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB**	**Jumlah Dokumen Pelaksanaan dan Pembinaan kesertaan ber KB yang tersusun dengan baik**	**4 Dokumen**	**4 Dokumen**	**4 Dokumen**	**4 Dokumen**		**4 Dokumen**	**4 Dokumen**	**1.744.734.620**
2	14	03	2.04	01	Penguatan peran serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	3 Organisasi	3 Organisasi	3 Organisasi	3 Organisasi	100	3 Organisasi	3 Organisasi	35.785.498
2	14	03	2.04	02	Integrasi pembangunan lintas sektor di Kampung KB	Jumlah dokumen hasil Integrasi pembangunan lintas sektor di kampung KB	2 Dokumen	-	-	-	-	-	2 Dokumen	1.155.999.910
2	14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	15 Kampung KB	15 Kampung KB	15 Kampung KB	15 Kampung KB	100	15 Kampung KB	15 Kampung KB	552.949.212
2	**14**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Cakupan Kelompok Bina Keluarga yang dibina (%)**	**71,04%**	**71,04%**	**71,04%**	**71,04%**				**2.688.071.190**
2	**14**	**04**	**2.01**		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga**	**Jumlah Kelompok Bina Keluarga yang mendapatkan Pembinaan**	**12 Kelompok**	**12 Kelompok**	**12 Kelompok**	**12 Kelompok**		**12 Kelompok**	**12 Kelompok**	**2.674.921.988**
2	14	04	2.01	01	Pembentukan kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan konseling remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) dan pemberdayaan ekonomi keluarga	Jumlah Kelompok Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	12 Kelompok	12 Kelompok	12 Kelompok	12 Kelompok	100	12 Kelompok	12 Kelompok	13.430.258
				02	Pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	Jumlah unit sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPLS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	12 Unit	-	-	-		-	-	126.000.000

2	14	04	2.01	05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan pelaksana (kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/PPKS)	110 Orang	110 Orang	110 Orang	110 Orang	100	110 Orang	110 Orang	2.479.100.000
2	14	04	2.01	08	Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (menjadi orang tua hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta pengelolaan keuangan	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	56.391.730
2	**14**	**04**	**2.02**		**Pelaksanaan dan peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan tingkat daerah Kabuapten/Kota dalam pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Jumlah kader yang mendapatkan Advokasi dari mitra kerja/organisasi kemasyarakatan'**	**60 Orang**	**60 Orang**	**60 Orang**	**60 Orang**		**60 Orang**	**60 Orang**	**13.149.202**
2	14	04	2.02	02	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitrakerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Opersional Pembinaan Program Ketahanan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIR R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	Jumlah kader yang mendapatkan Advokasi dari mitra kerja/organisasi kemasyarakatan'	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	13.149.202

1.2. Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Dalam mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang diinginkan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (outcomes). Bidang Sosial merupakan bagian dari Enam urusan wajib pelayanan Dasar yang harus dilaksanakan, Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten / Kota. Dalam Peraturan menteri tersebut lebih lanjut ditentukan 5 jenis pelayanan dasar bidang sosial serta indikator dan target SPM yang harus dicapai oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu :

a. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial;
b. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial;
c. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial;
d. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial; dan
e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan Permendagri Nomor 84 tahun 2022 khusus untuk bidang Rehabilitasi Sosial sebagai pengampuh SPM, sudah mengakomodir seluruh sub kegiatan yang ada pada Permendagri 84 Tahun 2022, hal ini bertujuan agar pencapaian SPM pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

Berencana dapat melakukan pelayanan yang maksimal sesuai dengan target capaian kinerja yang ada pada SPM Bidang sosial, khususnya bidang Rehabilitasi Sosial. Dimana capaian pelaporan SPM rutin dilakukan secara Triwulan kepada Bangda Kemendari.

Analisa capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau dapat dilihat pada tabel 2.2 Terlampir:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan DINSOSP3AKB
Kabupaten Sanggau

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	SPM / Standar Nasional	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun		Proyeksi		Catatan Penting
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase PMKS yang tertangani	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti sosial;		96,9	97	97,45	97,75	69,06	69,06	97,45	97,75	
		Rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar diluar panti sosial		100%	100%	100%	100%	100%	97,45	97,45	97,75	
		Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti sosial;		100%	100%	100%	100%	100%	97,45	97,45	97,75	
		Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan pengemis luar panti sosial;		100%	100%	100%	100%	100%	97,45	97,45	97,75	
		Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah Tanggap darurat Bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota		100%	100%	100%	100%	100%	97,45	97,45	97,75	
2	Persentase PPKS yang mandiri	%		25,00	25,00	26,50	26,50	25,39	25,39	25,60	25,60	
3	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%		61,54	61,42	61,54	61,65	10,22	10,22	61,54	61,65	
4	Capaian Status Kabupaten Layak Anak (KLA)	%		Madya	Madya	Madya	Madya	Pratama	Madya	Madya	Madya	
5	Total Fertility Rate	Point		2.22	2.23	2.22	2.21	2,18	2,18	2.22	2.21	
6	Nilai AKIP Dinsosp3akb	%		60,00	65,00	68,00	69,00	69,50	69,50	69,50	69,50	

1.3 Isu-Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau

Seperti diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Sanggau 2014-2019,dimana diharapkan semua kepentingan masyarakat yang memiliki latar belakang sosial, budaya, politik dan ekonomi agar dapat diakomodir dengan fokus untuk mewujudkan masayarakat Kabupaten Sanggau yang Maju dan Terdepan.

Untuk jangka waktu lima tahun kedepan seiring dengan perubahan yang terjadi, beberapa isu strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau kedepan.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. **Sosial**

Permasalahan utama pelaksanaan urusan sosial adalah:

a. Belum optimalnya pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); dan
b. Belum terbangunnya sistem perlindungan dan jaminan sosial.

2. **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Permasalahan utama pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah:

a. Belum optimalnya pencapaian kualitas hidup perempuan dan peran perempuan dalam pembangunan;
b. Pembangunan responsif gender belum maksimal;
c. Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar anak belum memadai; dan

d. Belum optimalnya sarana, prasarana dan penanganan terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
e. Belum maksimalnya Advokasi, KIE perempuan dan anak

3. **Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Permasalahan utama pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah:

a. Sarana dan prasarana pendukung program KB belum memadai;
b. Belum optimalnya pelaksanaan Advokasi dan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi); dan
c. Masih rendahnya akseptor dan partisipasi keikutsertaan pria dalam program KB.
d. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia Petugas Lapangan Keluarga Berencana.
e. Belum Optimalnya system pencatatan dan pelaporan pengendalian penduduk.

2.4.Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja Pemenrintah Daerah Kabupaten Sanggau pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana pada tahun 2024 terdapat 15 (Lima Belas) Program (Sembilan Belas) Program dan 64 (Enam Puluh Empat) Kegiatan. Setelah melaksanakan Asisten terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2023 oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau serta menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga pada Tahun anggaran 2023 terdapat perubahan jumlah beserta nama program dan kegiatan yang terdapat pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana menjadi 18 (Delapan Belas) Program dan 59 (Lima Puluh Sembilan) Kegiatan. Pada tahun 2021 terdapat perubahan kodesifikasi dan Nomenklatur dalam penyusunan Rencana Kerja yang tertuang dalam Permendagri 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dimana pada bulan mei tahun 2020 telah dilakukan maping antara permendagri 13 dan permendagri 90 yang dtuangan kan dalam BA Maping antara Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, setelah dilakukan maping tersebut ternyata pada bulan September 2020 terjadi pemutakhiran terhadap Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, hasil pemutakhiran tersebut dtuangkan kedalam Rencana Kerja Anggaran Tahun 2021. Sesuai Pemutakhiran Permendagri nomor 90 Tahun 2019 untuk Dinas Sosial, Permberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab. Sanggau terdapat 15 (Lima Belas) Program, 35 (Tiga Puluh Lima Kegiatan) serta 116 (Sembilan Puluh Tujuh) Sub Kegiatan.

Daftar table Review terhadap Rancangan Awal RKPD Terlampir :

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Sanggau

Nama Perangkat Daerah: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab. Sanggau

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DINSOSP3AKB KAB.SANGGAU				**25.528.517.065**					**25.734.197.421**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**				**14.412.363.762**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**				**14.618.044.118**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHG KABUPATEN/KOTA		**Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan bidang urusan Sosial, Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana**	**100%**	**6.312.566.001**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHG KABUPATEN/KOTA**		**Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan bidang urusan Sosial, Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana**	**100%**	**6.312.566.001**	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun**	**12 Dokumen**	69.616.747	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun**	**12 Dokumen**	69.616.747	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	9.336.060	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	9.336.060	
	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	27.576.247	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	27.576.247	
	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Dokumen Perubahan RKA -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	6.980.160	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Dokumen Perubahan RKA -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	6.980.160	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.111.040	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.111.040	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.348.980	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.348.980	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	6.810.330	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	6.810.330	

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	9.453.930	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	9.453.930	
	Administrasi dan Keuangan Perangkat Daerah		**Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun dan diverifikasi**	**30 Dokumen**	**4.761.478.366**	**Administrasi dan Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun dan diverifikasi**		**4.761.478.366**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang	2.774.138.431	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang	2.774.138.431	
	Penyedia Administrasi Pelaksana tugas ASN	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1.764.474.311	Penyedia Administrasi Pelaksana tugas ASN	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1.764.474.311	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	170.006.045	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	170.006.045	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	37.699.554	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	37.699.554	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.035.295	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.035.295	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	2.748.582	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	2.748.582	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	5.935.703	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	5.935.703	
	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	3.440.445	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	3.440.445	
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	**Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin**		**7 Dokumen**	**31.615.354**	**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin**	**Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**7 Dokumen**	**31.615.354**	

	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	6.280.424	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	6.280.424	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	8.534.930	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	8.534.930	
	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Dokumen	16.800.000	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Dokumen	16.800.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Jumlah Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian**	**5 Dokumen**	**60.035.522**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Jumlah Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian**	**5 Dokumen**	**60.035.522**	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	44.100.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	44.100.000	
	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dok	5.357.393	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dok	5.357.393	
	Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem	2 Dok	6.296.060	Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem	2 Dok	6.296.060	
	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dok	4.282.069	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dok	4.282.069	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan	16 Orang	77.776.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	16 Orang	77.776.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	35 Orang	6.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi	35 Orang	6.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat daerah		**Jumlah Layanan Administrasi Umum yang disediakan**	**10 Jenis**	**522.206.749**	**Administrasi Umum Perangkat daerah**		**Jumlah Layanan Administrasi Umum yang disediakan**	**10 Jenis**	**522.206.749**	
	Penyedian Komponen Instlasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	8.500.000	Penyedian Komponen Instlasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	8.500.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	170.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	170.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	45.431.980	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	45.431.980	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	29.035.513	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	29.035.513	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1095 Dokumen	9.088.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1095 Dokumen	9.088.000	
	Penyediaan bahan / Material	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	48.594.800	Penyediaan bahan / Material	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	48.594.800	

	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	6.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	6.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	192 Laporan	195.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	192 Laporan	195.000.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen	5.345.494	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen	5.345.494	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	5.210.962	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	5.210.962	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Jumlah Dokuemn Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah**	**13 Unit**	**283.800.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah Dokuemn Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah**	**13 Unit**	**283.800.000**	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	163.800.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas yang diadakan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	4 Unit	163.800.000	
	Pengadaan Mebel	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Mebeleur yang diadakan	9 unit	120.000.000	Pengadaan Mebel	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Mebeleur yang diadakan	9 Jenis	120.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Jumlah layanan administrasi umum yang disediakan**	**3 Jenis**	**276.029.320**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah layanan administrasi umum yang disediakan**	**3 Jenis**	**276.029.320**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	256 Laporan	2.472.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	256 Laporan	2.472.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	150.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	150.000.000	
	Penyedian Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	123.557.320	Penyedian Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	123.557.320	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah		**Jumlah Layanan Administrasi Umum yang disediakan**	**3 Jenis**	**307.783.943**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah Layanan Administrasi Umum yang disediakan**	**3 Jenis**	**307.783.943**	
	Penyedian Jasa Pemeliharan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	178.000.000	Penyedian Jasa Pemeliharan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	178.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainya	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	29.600.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainya	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	94 Unit	29.600.000	
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.183.943	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.183.943	

	URUSAN BIDANG SOSIAL				**8.099.797.761**					**8.305.478.117**	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		**Jumlah PMKS yang terfasilitasi**		**354.356.705**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**		**Jumlah PMKS yang terfasilitasi**		**455.036.705**	
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota		**Jumlah PMKS yang tertangani**	**4 Lembaga**	**354.356.705**	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota**		**Jumlah PMKS yang tertangani**	**4 Lembaga**	**455.036.705**	
	Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota	Kab. Sanggau	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	16 Orang	142.124.955	Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota	Kab. Sanggau	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	16 Orang	142.124.955	
	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota	Kab. Sanggau	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Lembaga	132.231.750	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota	Kab. Sanggau	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Lembaga	132.231.750	
	Peningkatan kemampuan sumber daya manuasi dan penguatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3)	Kab. Sanggau	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	0	80.000.000	Peningkatan kemampuan sumber daya manuasi dan penguatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3)	Kab. Sanggau	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	0	180.680.000	
	PROGRAM PENANGANAN WARGA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN		**Jumlah Warga Negara Migran yang terfasilitasi**		**31.420.076**	**PROGRAM PENANGANAN WARGA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**		**Jumlah Warga Negara Migran yang terfasilitasi**		**31.420.076**	
	Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal		**Jumlah Warga Negara Migran yang terfasilitasi**		31.420.076	**Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal**		**Jumlah Warga Negara Migran yang terfasilitasi**		**31.420.076**	
	Fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Kabupaten Kota untuk dipulangkan ke Desa / Kelurahan Asal	Kab. Sanggau	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan	200 Orang	31.420.076	Fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Kabupaten Kota untuk dipulangkan ke Desa / Kelurahan Asal	Kab. Sanggau	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan	200 Orang	31.420.076	
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		**Persentase PMKS Yang tertangani**		**2.735.947.418**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**		**Persentase PMKS Yang tertangani**		**2.735.947.418**	
	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial		**Jumlah PMKS yang tertangani**	**795 Orang**	**2.735.947.418**	**Rehabilitasi Sosial dasar penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial**		**Jumlah PMKS yang tertangani**	**795 Orang**	**2.735.947.418**	

	Penyediaan Permakanan	Kab. Sanggau	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	0	1.037.728.981	Penyediaan Permakanan	Kab. Sanggau	Jumlah orang yang mendapatkan pemmenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan standar Gizi minimal kewenangan Kabupaten/kota	425 Orang	1.037.728.981	
	Penyediaan Sandang	Kab. Sanggau	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan Kabupaten/Kota.	471 Orang	49.999.727	Penyediaan Sandang	Kab. Sanggau	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan Kabupaten/Kota.	471 Orang	49.999.727	
	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Sanggau	Jumlah Orang yang mendapatkan Alat Bantu Peraga sesuai Kebetuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	50.000.064	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Sanggau	Jumlah Orang yang mendapatkan Alat Bantu Peraga sesuai Kebetuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	50.000.064	
	Pemberian Layanan Reunifikasi Keluarga	Kab. Sanggau	Jumlah Orang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	19.999.993	Pemberian Layanan Reunifikasi Keluarga	Kab. Sanggau	Jumlah Orang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	19.999.993	
	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Kab. Sanggau	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang	9.999.982	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Kab. Sanggau	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang	9.999.982	
	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar serta gelandangan pengemis dan masyarakat.	Kab. Sanggau	Jumlah peserta bimbingan sosial kepada keluarga penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota.	560 Orang	1.191.218.922	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar serta gelandangan pengemis dan masyarakat.	Kab. Sanggau	Jumlah peserta bimbingan sosial kepada keluarga penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota.	560 Orang	1.191.218.922	
	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	Kab. Sanggau	Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Indentitas Anak bagi penyandang Disabilitas kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	15.000.053	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	Kab. Sanggau	Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Indentitas Anak bagi penyandang Disabilitas kewenangan	20 Orang	15.000.053	
	Pemberian Akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab. Sanggau	Jumlah orang yang mendapatkan Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan Kabupaten/Kota	141 Orang	19.999.786	Pemberian Akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab. Sanggau	Jumlah orang yang mendapatkan Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan Kabupaten/Kota	141 Orang	19.999.786	
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kab. Sanggau	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota	560 Orang	20.000.094	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kab. Sanggau	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota	560 Orang	20.000.094	
	Pemberian layanan kedaruratan	Kab. Sanggau	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	59.999.854	Pemberian layanan kedaruratan	Kab. Sanggau	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	59.999.854	

	Pemberian pelayanan penelurusan keluarga	Kab. Sanggau	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	9.999.943	Pemberian pelayanan penelurusan keluarga	Kab. Sanggau	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	9.999.943	
	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Sanggau	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	370 Orang	252.000.019	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Sanggau	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	370 Orang	252.000.019	
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial				**18.305.458**	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**				**18.305.458**	
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kab. Sanggau	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota	50 Orang	4.300.010	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kab. Sanggau	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota	50 Orang	4.300.010	
	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Sanggau	Jumlah Orang yang mendapatkan Alat Bantu Peraga sesuai Kebetuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	9.605.255	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Sanggau	Jumlah Orang yang mendapatkan Alat Bantu Peraga sesuai Kebetuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	9.605.255	
	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kab. Sanggau	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan	50 Orang	4.400.193	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kab. Sanggau	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	50 Orang	4.400.193	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		**Persentase Bantuan Sosial yang diberikan kepada masyarakat**		**4.465.094.346**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**		**Persentase Bantuan Sosial yang diberikan kepada masyarakat**		**4.570.094.702**	
	Pemeliharaan Anak-anak Terlantar		**Jumlah Panti Asuhan yang mendapatkan Bantuan**	**628 Orang**	**165.094.346**	**Pemeliharaan Anak-anak Terlantar**		**Jumlah Panti Asuhan yang mendapatkan**	**9 Panti**	**270.094.702**	
	Penjangkauan Anak-anak Terlantar	Kab. Sanggau	Jumlah Anak-anak terlantar yang dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	0	6.999.661	Penjangkauan Anak-anak Terlantar	Kab. Sanggau	Jumlah Anak-anak terlantar yang dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	6.999.661	
	Rujukan Anak-anak Terlantar	Kab. Sanggau	Jumlah Anak-anak terlantar yang mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	4.999.700	Rujukan Anak-anak Terlantar	Kab. Sanggau	Jumlah Anak-anak terlantar yang mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	4.999.700	
	Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar	Kab. Sanggau	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	608 Orang	165.094.346	Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar	Kab. Sanggau	Jumlah panti asuhan yang dibina dalam menyediakan pelayanan kesejahteraan sosial	608 Orang	270.094.702	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah Dokumen Data Kemiskinan yang disusun**	**2 Dokumen**	**4.300.000.000**	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Dokumen Data Kemiskinan yang disusun**	**2 Dokumen**	**4.300.000.000**	
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Data Fakir Miskin Kabupaten Sanggau yang disusun	1 Dokumen	1.000.000.000	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Data Fakir Miskin Kabupaten Sanggau yang disusun	1 Dokumen	1.000.000.000	

	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Data Fakir Miskin Kabupaten Sanggau yang disusun	1 Dokumen	300.000.000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Data Fakir Miskin Kabupaten Sanggau yang disusun	1 Dokumen	300.000.000	
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Sanggau	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang mendapatkan bantuan sosial yang disediakan	5 Jenis Bantuan	2.000.000.000	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Sanggau	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang mendapatkan bantuan sosial yang disediakan	5 Jenis Bantuan	2.000.000.000	
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kab. Sanggau	Jumlah Kelompok usaha bersama yang mendapatkan Bantuan pengembangan Ekonomi yang disediakan	6 KUBE	1.000.000.000	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kab. Sanggau	Jumlah Kelompok usaha bersama yang mendapatkan Bantuan pengembangan Ekonomi yang disediakan	6 KUBE	1.000.000.000	
	PROGRAM PENANGAN BENCANA		**Jumlah Korban Bencana yang tertangani**		**262.979.216**	**PROGRAM PENANGAN BENCANA**		**Jumlah Korban Bencana yang tertangani**		**262.979.216**	
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		**Jumlah Korban Bencana yang tertangani**		**262.979.216**	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**		**Jumlah Korban Bencana yang tertangani**		**262.979.216**	
	Penyediaan Makanan	Kab. Sanggau	Jumlah penerima bantuan bencana alam/sosial yang menerima makanan yang disediakan	300 Orang	110.930.930	Penyediaan Makanan	Kab. Sanggau	Jumlah penerima bantuan bencana alam/sosial yang menerima makanan yang disediakan	300 Orang	110.930.930	
	Penyediaan Sandang	Kab. Sanggau	Jumlah penerima bantuan bencana alam/sosial yang menerima makanan yang disediakan	300 Orang	30.003.866	Penyediaan Sandang	Kab. Sanggau	Jumlah penerima bantuan bencana alam/sosial yang menerima makanan yang disediakan	300 Orang	30.003.866	
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kab. Sanggau	Jumlah tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Unit	62.805.215	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kab. Sanggau	Jumlah tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Unit	62.805.215	
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kab. Sanggau	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	24.376.905	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kab. Sanggau	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	24.376.905	
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kab. Sanggau	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	34.862.300	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kab. Sanggau	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	34.862.300	
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		**Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang di pelihara**		**250.000.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**		**Jumlah TMP yang mendaoat pemeliharaan**		**250.000.000**	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		**250.000.000**	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**				**250.000.000**	
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	3 TMP	250.000.000	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	**3 TMP**	250.000.000	

	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				**3.562.605.267**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				**3.562.605.267**	
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		**Persentase Dokumen Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan yang disusun**	**100%**	**2.461.782.613**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**		**Persentase Dokumen Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan yang disusun**	**100%**	**2.461.782.613**	
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintahan kewenangan Kabupaten/Kota	**Kab. Sanggau**	**Jumlah dokumen penyusunan indikator APE**	**3 Dokumen**	**96.186.108**	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintahan kewenangan Kabupaten/Kota**	**Kab. Sanggau**	**Jumlah dokumen penyusunan indikator APE**	**3 Dokumen**	**96.186.108**	
	Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kab. Sanggau	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	28 Perangkat Daerah	96.186.108	Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kab. Sanggau	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	28 Perangkat Daerah	96.186.108	
	Pemberdayaan perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kabupaten/Kota				**143.885.448**	**Pemberdayaan perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kabupaten/Kota**				**143.885.448**	
	Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	55.192.988	Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	55.192.988	
	Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik hukum sosial dan ekonomi	Kab. Sanggau	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Organisasi	88.692.460	Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik hukum sosial dan ekonomi	Kab. Sanggau	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan	2 Organisasi	88.692.460	
	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota				**2.221.711.057**	**Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota**				**2.221.711.057**	
	Advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Kab. Sanggau	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	31 Lembaga	2.135.294.076	Advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Kab. Sanggau	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	31 Lembaga	2.135.294.076	

	Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/kota	Kab. Sanggau	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	200 Orang	31.336.993	Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/kota	Kab. Sanggau	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	200 Orang	31.336.993	
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	55.079.988	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan	2 Dokumen	55.079.988	
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		**Jumlah kasus terhadap perempuan yang tertangani**		**379.052.424**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**				**379.052.424**	
	Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan linkup daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	**Jumlah Dokumen kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani**		**80.119.115**	**Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan linkup daerah Kabupaten/Kota**	**Dinsosp3akb**			**80.119.115**	
	Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Kab. Sanggau	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Perangkat Daerah	80.119.115	Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Dinsosp3akb	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Perangkat Daerah	80.119.115	
	Penyediaan layanan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota		**Jumlah kasus terhadap perempuan yang tertangani**		**130.000.000**	**Penyediaan layanan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota**				**130.000.000**	
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	Kab. Sanggau	Jumlah Korban kekerasan tingkat Kabupaten/Kota yang mendapat layanan pengaduan	25 Orang	130.000.000	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	Dinsosp3akb	Jumlah Korban kekerasan tingkat Kabupaten/Kota yang mendapat layanan pengaduan	25 Orang	130.000.000	
	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota	**Kab. Sanggau**	**Jumlah Dokumen kesepakatan bersama antar jejaring yang disepakati**	**1 Dokumen**	**168.933.309**	**Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota**				**168.933.309**	
	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	**Kab. Sanggau**	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	100 Orang	100.000.000	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	**Kab. Sanggau**	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	100 Orang	100.000.000	
	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen kesepakatan bersama antar jejaring yang disepakati	1 Dokumen	68.933.309	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen kesepakatan bersama antar jejaring yang disepakati	1 Dokumen	68.933.309	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		**Persentase Dokumen Data Gender dan Anak tersusun dengan baik**		**141.272.112**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**		**Persentase Dokumen Data Gender dan Anak tersusun dengan baik**		**141.272.112**	
	Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota	**Kab. Sanggau**	**Jumlah Dokumen pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak yang disusun**	**2 Dokumen**	**141.272.112**	**Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota**	**Kab. Sanggau**	**Jumlah Dokumen pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak yang disusun**	**2 Dokumen**	**141.272.112**	

	Penyediaan data gender dan anak di kewenangan kabupaten/kota	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang tersedia	2 Dokumen	81.272.112	Penyediaan data gender dan anak di kewenangan kabupaten/kota	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang tersedia	2 Dokumen	81.272.112	
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	60.000.000	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam kelembagaan Data di Kewenangan	1 Dokumen	60.000.000	
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		**Persentase Dokumen Kabupaten Layak Anak yang tersusun dengan baik**		**336.000.000**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**		**Persentase Dokumen Kabupaten Layak Anak yang tersusun dengan baik**		**336.000.000**	
	Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha kewenangan Kabupaten/Kota	**Kab. Sanggau**	**Jumlah Dokumen Pencapaian Indikator Kabupaten Layak anak yang disusun**	**1 Dokumen**	**100.000.000**	**Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha kewenangan Kabupaten/Kota**	**Kab. Sanggau**	**Jumlah Dokumen Pencapaian Indikator Kabupaten Layak anak yang disusun**	**1 Dokumen**	**100.000.000**	
	Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan Hak anak pada lembaga pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	Jumlah Organisasi Pemerintahan, Non Pemerintahan, Media dan Dunia Usaha yang mendapat Advokasi kebijakan dan pendampingan Pemenuhan Haka Anak pada organisasi Pemerintahan, Non Pemerintahan Media dan Dunia Usaha	47 Organisasi	35.000.000	Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan Hak anak pada lembaga pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	Jumlah Organisasi Pemerintahan, Non Pemerintahan, Media dan Dunia Usaha yang mendapat Advokasi kebijakan dan pendampingan Pemenuhan Haka Anak pada organisasi Pemerintahan, Non Pemerintahan Media dan Dunia Usaha	47 Organisasi	35.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan pemenuhan Hak anak kewenangan kabupaten/kota	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Pencapaian Indikator Kabupaten Layak anak yang disusun	1 Dokumen	65.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan pemenuhan Hak anak kewenangan kabupaten/kota	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Pencapaian Indikator Kabupaten Layak anak yang disusun	1 Dokumen	65.000.000	
	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota	**Kab. Sanggau**	**Jumlah Lembaga Penyedia layanan Kualitas hidup anak yang tersedia**	**33 Lembaga**	**236.000.000**	**Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota**	**Kab. Sanggau**	**Jumlah Lembaga Penyedia layanan Kualitas hidup anak yang tersedia**	**33 Lembaga**	**236.000.000**	
	Penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	Jumlah lembaga penyedia layanan yang mendukung peringatan dalam pengembangan kualitas hidup anak	360 Orang	36.000.000	Penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	Jumlah lembaga penyedia layanan yang mendukung peringatan dalam pengembangan kualitas hidup anak	360 Orang	36.000.000	
	Pengembangan komunikasi, informasi dan Edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	Jumlah peserta forum anak daerah tingkat Kabupaten, kecamatan, Desa/Kelurahan yang dibina	1 Dokumen	95.000.000	Pengembangan komunikasi, informasi dan Edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	Jumlah peserta forum anak daerah tingkat Kabupaten, kecamatan, Desa/Kelurahan yang dibina	1 Dokumen	95.000.000	
	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Hasil penguatan jejaring antar Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas Hidup anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	105.000.000	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Hasil penguatan jejaring antar Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas Hidup anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	105.000.000	
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		**Persentase kasus kekerasan anak tertangani**		**244.498.118**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**				**244.498.118**	

	Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten/Kota	**Kab. Sanggau**	**Jumlah desa yang mendapat sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak**	**3 Desa**	**59.963.310**	**Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Sanggau**	**Persentase kasus kekerasan anak tertangani**	**3 Desa**	**59.963.310**	
	Koordinasi dan Sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	59.963.310	Koordinasi dan Sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	59.963.310	
	Penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota	**Kab. Sanggau**	**Jumlah Dokumen Layanan bagi anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang disusun**	**2 Dokumen**	**184.534.808**	**Penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota**	**Kab. Sanggau**	**Jumlah Dokumen Layanan bagi anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang disusun**	**2 Dokumen**	**184.534.808**	
	Penyedia layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang	75.000.000	Penyedia layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang	75.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	40.882.538	Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	40.882.538	
	Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Masyarakat	63.532.070	Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Masyarakat	63.532.070	
	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memelukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	5.120.200	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memelukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	5.120.200	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				**7.553.548.036**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				**7.553.548.036**	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		**Total Fertility Rate (TFR)**	**2.22 point**	**267.248.881**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**		**Total Fertility Rate (TFR)**	**2.22 point**	**267.248.881**	

	Pemaduan dan Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	**Kab. Sanggau**	**Jumlah Dokumen Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah yang tersusun dengan baik**	**3 Dokumen**	**60.024.460**	**Pemaduan dan Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**Kab. Sanggau**	**Jumlah Dokumen Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah yang tersusun dengan baik**	**3 Dokumen**	**60.024.460**	
	Penyerasian kebijakan pembangunan daerah Kabupaten/Kota terhadap kependudukan , keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan keluarga Berencana)	2 Dokumen	4.875.000	Penyerasian kebijakan pembangunan daerah Kabupaten/Kota terhadap kependudukan , keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan keluarga Berencana)	2 Dokumen	4.875.000	
	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten / Kota	1 Dokumen	44.839.140	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten / Kota	1 Dokumen	44.839.140	
	Penguatan kerjasama pelaksana pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	1 Dokumen	10.310.320	Penguatan kerjasama pelaksana pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	1 Dokumen	10.310.320	
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Kab. Sanggau**	**Jumlah Dokumen Pemetaan Pengendalian Penduduk**	**2 Dokumen**	**207.224.421**	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Sanggau**	**Jumlah Dokumen Pemetaan Pengendalian Penduduk**	**2 Dokumen**	**207.224.421**	
	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk memperkuat integrasi Program KKBPK di Sektor lain.	Kab. Sanggau	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor lain yang dibentuk.	2 Unit	2.025.000	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk memperkuat integrasi Program KKBPK di Sektor lain.	Kab. Sanggau	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor lain yang dibentuk.	2 Unit	2.025.000	
	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Kab. Sanggau	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang tersedia	2 Dokumen	64.199.421	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Kab. Sanggau	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang tersedia	2 Dokumen	64.199.421	
	Pengelolaan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	2 Dokumen	141.000.000	Pengelolaan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	2 Dokumen	141.000.000	
	Pembinaan dan pengawasan pencatatan dan pelaporan program KKBPK	Kab. Sanggau	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	1 Laporan	174.574.240	Pembinaan dan pengawasan pencatatan dan pelaporan program KKBPK	Kab. Sanggau	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	1 Laporan	174.574.240	
										366.389	
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		**Persentase pasangan usia subur (PUS) menjadi peserta kb aktif**	**71,23%**	**5.391.413.130**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**				**5.391.413.130**	

	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	**Kab. Sanggau**	**Jumlah Dokumen Advokasi KIE Pengendalian Penduduk dan KB**	**6 Dokumen**	**1.267.384.936**	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal**	**Kab. Sanggau**	**Jumlah Dokumen Advokasi KIE Pengendalian Penduduk dan KB**	**6 Dokumen**	**1.267.384.936**	
	Advokasi Program KKBPK Kepada Steakholder dan Mitra Kerja	Kab. Sanggau	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4 Organisasi	119.999.668	Advokasi Program KKBPK Kepada Steakholder dan Mitra Kerja	Kab. Sanggau	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4 Organisasi	119.999.668	
	Promosi dan KIE Program KKBPK melalui media masa cetak dan elektronik serta media luar ruang	Kab. Sanggau	Jumlah penyuluhan promosi KIE program KKBPK melalui media masa cetak dan elektronik serta media luar ruang	6 Unit	150.006.510	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Kab. Sanggau	Jumlah penyuluhan promosi KIE program KKBPK melalui media masa cetak dan elektronik serta media luar ruang	6 Unit	150.006.510	
	Pelaksanaan mekanisme operasional program KKBPK melalui rapat koordinasi kecamatan (Rakorcam), rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan mini lokakarya (Minilok)	Kab. Sanggau	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 Laporan	195.130.000	Promosi dan KIE Program KKBPK melalui media masa cetak dan elektronik serta media luar ruang	Kab. Sanggau	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini	1 Laporan	195.130.000	
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Kab. Sanggau	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana	1 Laporan	722.248.758	Penggunaan media masa cetak, elektronik dan media lainnya sesuai kearifan budaya lokal dalam pencitraan program KKBPK	Kab. Sanggau	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana	1 Laporan	722.248.758	
	Pengendalian Program KKBPK	Kab. Sanggau	Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK	1 Laporan	80.000.000	Pelaksanaan mekanisme operasional program KKBPK melalui rapat koordinasi kecamatan (Rakorcam), rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan	Kab. Sanggau	Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK	1 Laporan	80.000.000	
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	**Kab. Sanggau**	**Jumlah Kader IMP yang dibina**	**15 Orang**	**1.370.200.000**	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**				**1.370.200.000**	
	Penggerakan Kader Instituisi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kab. Sanggau	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	15 Orang	1.370.200.000	Penggerakan Kader Instituisi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kab. Sanggau	Jumlah Kader IMP yang dibina	15 Orang	1.370.200.000	
	Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	**Kab. Sanggau**	**Jumlah Faskes yang mendapat pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi**	**33 faskes**	**1.065.920.311**	**Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Sanggau**	**Jumlah Faskes yang mendapat pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi**	**33 faskes**	**1.065.920.311**	

	Pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Kab. Sanggau	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	29.700.000	Pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Kab. Sanggau	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	29.700.000	
	Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontasepsi jangka pangjang (MKJP)	Kab. Sanggau	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	12.709 Orang	370.062.311	Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontasepsi jangka pangjang (MKJP)	Kab. Sanggau	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	12.709 Orang	370.062.311	
	Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB	Kab. Sanggau	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	15 Unit	497.858.000	Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB	Kab. Sanggau	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	15 Unit	497.858.000	
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya.	Kab. Sanggau	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	168.300.000	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya.	Kab. Sanggau	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	168.300.000	
	Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB	**Kab. Sanggau**	**Jumlah Dokumen Pelaksanaan dan Pembinaan kesertaan ber KB yang tersusun dengan baik**	**4 Dokumen**	**1.687.907.883**	**Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB**	**Kab. Sanggau**	**Jumlah Dokumen Pelaksanaan dan Pembinaan kesertaan ber KB yang tersusun dengan baik**	**4 Dokumen**	**1.687.907.883**	
	Penguatan peran serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber-KB	Kab. Sanggau	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	3 Organisasi	35.907.973	Penguatan peran serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber-KB	Kab. Sanggau	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	3 Organisasi	35.907.973	
	Integrasi pembangunan lintas sektor di Kampung KB	Kab. Sanggau	Jumlah dokumen hasil Integrasi pembangunan lintas sektor di kampung KB	2 Dokumen	1.155.999.910	Integrasi pembangunan lintas sektor di Kampung KB	Kab. Sanggau	Jumlah dokumen hasil Integrasi pembangunan lintas sektor di kampung KB	2 Dokumen	1.155.999.910	
	Pelaksanaan dan Pengelolaan program KKBPK di Kampung KB	Kab. Sanggau	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	15 Kampung KB	496.000.000	Pelaksanaan dan Pengelolaan program KKBPK di Kampung KB	Kab. Sanggau	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	15 Kampung KB	496.000.000	

	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		**Cakupan Kelompok Bina Keluarga yang dibina (%)**	**71,04%**	**1.894.886.025**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**		**Cakupan Kelompok Bina Keluarga yang dibina (%)**	**71,04%**	**1.894.886.025**	
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	**Kab. Sanggau**			**1.827.038.723**	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga**				**1.827.038.723**	
	Pembentukan kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan konseling remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) dan pemberdayaan ekonomi keluarga	Kab. Sanggau	Jumlah Kelompok Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	12 Kelompok	14.113.953	Pembentukan kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan konseling remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) dan pemberdayaan ekonomi keluarga	Kab. Sanggau	Jumlah Kelompok Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	12 Kelompok	14.113.953	
	Pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	Kab. Sanggau	Jumlah unit sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPLS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	12 Unit	126.000.000	Pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	Kab. Sanggau	Jumlah unit sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPLS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	12 Unit	126.000.000	
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan pelaksana (kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Sanggau	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/PPKS)	110 Orang	1.578.100.000	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan pelaksana (kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Sanggau	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/PPKS)	110 Orang	1.578.100.000	
	Penyediaan biaya operasional bagi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	Kab. Sanggau	Jumlah kelompok kegiatan ketahanan dan Kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	12 Kelompok	67.199.984	Penyediaan biaya operasional bagi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	Kab. Sanggau	Jumlah kelompok kegiatan ketahanan dan Kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	12 Kelompok	67.199.984	
	Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (menjadi orang tua hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta pengelolaan keuangan	Kab. Sanggau	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	1 Laporan	41.624.786	Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (menjadi orang tua hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta pengelolaan keuangan	Kab. Sanggau	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	1 Laporan	41.624.786	

	Pelaksanaan dan peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan tingkat daerah Kabuapten/Kota dalam pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	**Kab. Sanggau**	**Jumlah kader yang mendapatkan Advokasi dari mitra kerja/organisasi kemasyarakatan'**	**60 Orang**	**67.847.302**	**Pelaksanaan dan peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan tingkat daerah Kabuapten/Kota dalam pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Kab. Sanggau**	**Jumlah kader yang mendapatkan Advokasi dari mitra kerja/organisasi kemasyarakatan'**	**60 Orang**	**67.847.302**	
	Pendayagunaan Mitra kerja dan Organisasi kemasyarakatan dalam penggerakan operasional pembinaan program ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Sanggau	Jumlah kader yang mendapatkan Advokasi dari mitra kerja/organisasi kemasyarakatan'	1 Laporan	67.847.302	Pendayagunaan Mitra kerja dan Organisasi kemasyarakatan dalam penggerakan operasional pembinaan program ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Sanggau	Jumlah kader yang mendapatkan Advokasi dari mitra kerja/organisasi kemasyarakatan'	1 Laporan	67.847.302	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024 menetapkan prioritas pembangunan daerah tahun 2024. Dari 15 (Lima belas) program dan 35 (Tiga Puluh Lima) Kegiatan dan 116 (Seratus enam belas) Sub kegiatan ada satu kegiatan lama yang tidak dimasukkan dalam Ranwal 2024, yaitu Kegiatan Penataan Organisasi yang merupakan tugas pokok dan fungsi Bagian Organisai.

Dari Hasil Musyawarah Pembangunan Daerah tingkat kecamatan untuk tahun 2024 terdapat beberapa usulan dari masyarakat yaitu usulan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 323 (tiga ratus dua puluh tiga) RTLH yang diusulkan oleh beberapa kecamatan dan yang telah berhasil di Verifikasi oleh Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin yang diusulkan untuk tahun 2024. Selain usulan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang diusulkan oleh Masyarakat ada juga beberapa program kegiatan lain yang diusulkan terkait sosialisasi mengenai peningkatan Kapasitas Perempuan terhadap Pembangunan, Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) mulai dari pelaporan hingga rujukan ODGJ menggunakan BPJS untuk dapat di antarkan ke Rumah Sakit Jiwa Singkawang untuk di lakukan Rehabilitasi.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Sanggau

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab.Sanggau

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab.Sanggau	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten	150.000 Orang	

			Kota yang di Data		
2.	Pemberian Layanan Rujukan	Kab.Sanggau	Jumlah Orang mendapatkan layanan Rujukan kewenangan Kabupaten Sanggau	370 Orang	

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sanggau merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah yang berisikan tentang tujuan, sasaran, arah kebijakan, kebijakan umum dan program Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan memperhatikan potensi, permalsalahan dan peluang yang dimiliki Kabupaten Sanggau, nilai-nilai visi daerah, aspirasi dan dinamika yang berkembang pada masa 5 tahun sebelumnya (2009-2014), maka visi Kabupaten Sanggau untuk periode 2014-2019 adalah :

“ SANGGAU MAJU DAN TERDEPAN “

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut adalah :

1. **MAJU** keadaan yang menunjukan meningkatnya berbagai indikator pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial dan budaya dengan dukungan ketersediaan infrastruktur dasar, sarana dan prasarana, pelayanan public yang baik dan pemerintahan daerah yang professional, transparan, akuntabel dan demokratis berbasis elektronik.
2. **TERDEPAN** merupakan sebuah kondisi pertumbuhan indeks pembangunan manusia (IPM) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan menjadikan Kabupaten Sanggau yang bermartabat di Provinsi Kalimantan Barat.

   Sedangkan untuk Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024 terdapat 8 (delapan) Misi sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024 adalah:

1. Membangun dan meningkatkan infrastruktur, sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
2. Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, bermartabat dan berdaya saing
3. Meningkatkan taraf hidup masyarakat berbasis ekonomi rakyat.
4. Meningkatkan Tata kelola pemerintahan yang baik
5. Meningkatkan tata kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, religius, berbudaya, demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan local.
6. Meningkatkan kententraman dan ketertiban masyarakat
7. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan.
8. Meningkatkan percepatan pembangunan wilayah perbatasan yang bersinergi dengan pemerintah provinsi dan pusat.

Dari 8 (Delapan) Misi pembangunan daerah Kabupaten Sanggau 2019-2024, maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mengacu pada Misi yang ke dua (2) yaitu Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, bermartabat dan berdaya saing.

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau memiliki 3 tujuan diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial Masyarakat
2. Meningkatkan penanganan pengendalian penduduk dan KB
3. Meningkatkan penanganan kualitas Hidup Perempuan dan Anak

Dari ketiga tujuan tersebut Adapun yang menjadi sasaran kinerja adalah :

1. Menekan Angka keminskinan
2. Meningkatnya PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial
3. Meningkatnya penduduk yang ber KB
4. Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender dan Anak
5. Status Capaian Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)

Implementasi visi Kepala Daerah yang dituangkan dalam Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau yaitu : ***" TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT, KESETARAAN GENDER DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA KELUARGA BERENCANA MENUJU KELUARGA YANG SEJAHTERA"***

Dari Visi di atas dapat di jabarkan kedalam Sepuluh Misi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab. Sanggau, adapun sepuluh misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan perlindungan social untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar pelayanan social, pemberdayaan social dan jaminan social bagi PMKS
2. Meningkatkan profesionalisme kelembagaan kesejahteraan social dalam perlindungan social, Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial.
3. Mengembangkan kemampuan sumber daya dan Profesionalisme aparatur
4. Meningkatkan kemampuan sumber daya kader kelompok tribina kelompok usaha dan PIK-RM .
5. Meningkatkan kualitas koordinasi dengan mitra kerja
6. Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta meningkatkan partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan
7. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak untuk menuju Kabupaten Layak Anak.

8. Meningkatkan kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam ber KB.
9. Mengoptimalkan pembinaan kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS dan PIK-RM
10. Meningkatkan Pendapatan dan kesejahteraan keluarga.

Dari Visi dan Misi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tersebut memiliki sasaran yaitu:

1. Terwujudnya peningkatan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan Kemasyarakatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance
2. Terwujudnya pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
3. Terwujudnya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan wawasan sumber daya aparatur dalam melaksanakan tugas
4. Terwujudnya peningkatan pelayanan Publik
5. Terwujudnya peningkatan disiplin kerja dan loyalitas aparatur
6. Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat

3.2. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional (Kementrian Sosial)

Untuk meningkatkan peran sektor Sosial sebagai penghela pembangunan nasional, Kementerian Sosial pada periode 2015 - 2019 telah menetapkan visi pembanguan sosial, yaitu **"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Nilai dan Semangat Gotong Royong "**.Target utama penetapan visi pembangunan tersebut adalah untuk mewujudkan Dua sukses pembangunan pertanian, yaitu: 1) Berkontribusi menurunkan jumlah penduduk miskin dan Rentan, 2) Sistem penyelenggaraan Kesejahteraan social yang profesional. Hal ini menjadi panduan bagi Kementrian Sosial dalam penyusunan rencana strategis ke depan.Dari penjelasan diatas,

keterkaitan antara Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau dengan Kementerian terkait (Sosial) sama-sama berperan untuk menurunkan angka kemiskinan dan memiliki arah kebijakan yaitu :

1. Penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif
2. Pengembangan penghidupan berkelanjutan
3. Perluasan dan peningkatan akses pelayanan dasar
4. Pengauatan kelembagaan dan SDM penyelenggaraan Kesejahteraan sosial.

3.3. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional)

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang kewenangannya secara konkuren menjadi kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Dalam Undang undang ini secara tegas dijelaskan 4 (empat) Sub urusan yang menjadi kewenangan bersama, yaitu; 1) Pengendalian Penduduk, 2) Keluarga Berencana (KB), 3) Keluarga Sejahtera, serta 4) Standarisasi Pelayanan KB dan Sertifikasi Tenaga Penyuluh KB (PKB/PLKB). Adanya perubahan lingkungan strategis seperti perubahan pemerintahan dengan segala perubahan perilaku manajemen kepemerintahan negara, perubahan peraturan perundangan yang menjadi dasar penggerakan operasional program KKBPK sehingga mengubah beberapa kewenangan yang telah diserahkan ke daerah yang diatur melalui Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 dan dijadikan lampiran Undang - undang nomor 23 tahun 2014.

Beberapa isu strategis dan permasalahan pengendalian kuantitas penduduk, sebagaimana tertuang di dalam RPJMN 2015 - 2019

Buku II (Bab II – Bidang Sosial budaya) yang harus mendapat perhatian khusus adalah:

a. Penguatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)
b. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB yang Merata untuk dapat mengatasi permasalahan pelayanan KB,
c. Peningkatan pemahaman dan kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga sangat penting dalam upaya mengendalikan jumlah kelahiran dan menurunkan resiko kematian Ibu melahirkan.
d. Pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang ditandai dengan peningkatan pemahaman dan kesadaran fungsi keluarga.
e. Penguatan landasan hukum dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pembangunan bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB).
f. Penguatan Data dan Informasi Kependudukan, KB dan KS. Terdapat beberapa sumber data pembangunan kependudukan, KB dan KS, diantaranya administrasi kependudukan yang mencatat registrasi pendudukan dan registrasi vital; sensus penduduk dan beberapa survei terkait bidang kependudukan dan KB; serta data sektoral pembangunan kependudukan dan KB termasuk data - data kajian dan evaluasi pembangunan Kependudukan dan KB.

3.4. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Kementerian PPPA (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)

Kemen PPPA sesuai dengan tugas dan fungsinya mendukung pelaksanaan misi ke-4 pembangunan nasional dalam RPJMN tahun 2015-2019 yaitu Mewujudkan kualitas hidup manusia

Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera, dan Nawacita ke-5 yaitu Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.

Berdasarkan visi nasional di atas, sesuai dengan tugas dan fungsi Kemen PPPA mendukung pencapaian unsur visi Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian yaitu terciptanya kondisi sebagai berikut:

a. Kesetaraan Gender
b. Keadilan Gender
c. Perlindungan Perempuan
d. Pemenuhan Hak Anak

4.1. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Maksud disusunnya Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Beencana Kabupaten Sanggau Tahun 2020 adalah untuk melaksanakan dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja SKPD dan Rencana Kerja Anggaran OPD. Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau adalah :

1. Mendeskripsikan tentang program–program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau;
2. Program–program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program - program prioritas.

4.2. Program dan Kegiatan Tahun 2024

Untuk mewujudkan visi dan misi maka harus dipilih strategi yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja. Strategi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian Visi dan Misi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional/kegiatan nyata dari suatu rencana Strategis yang berturut-turut diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan,visi dan Misi.

Program dan Kegiatan berdasarkan urusan yang ditangani Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau dengan rincian sebagai berikut:

PROGRAM DAN KEGIATAN POKOK

Dalam mendukung pelaksanaan kinerja, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana memprogramkan beberapa kegiatan yaitu :

1.			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
	1.		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		2.	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD
		3.	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD Dokumen Perubahan RKA-SKPD
		4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
		5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
		6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	2.		Administrasi dan Keuangan Perangkat Daerah
		1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		2.	Penyedia Administrasi Pelaksana tugas ASN
		3.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD
		4.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi SKPD
		5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		6.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
		7.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
		8.	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
	3.		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
		1.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
		2.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
		3.	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD
	4.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
		2.	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
		3.	Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian
		4.	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
		5.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	5.		ADMNISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
		1.	Penyedian Komponen Instlasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
		2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		4.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
		5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan
		6.	Penyediaan bahan / Material
		7.	Fasilitasi Kunjungan Tamu
		8.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		9.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
		10.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
	6.		Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		1.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		2.	Pengadaan Mebel
	7.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		3.	Penyedian Jasa Pelayanan Umum Kantor
	8.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah
		1.	Penyedian Jasa Pemeliharan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
		2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainya
		3.	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2.			PROGRAM PEMBEREDAYAAN SOSIAL
	1.		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota
		1.	Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota
		2.	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota
		3.	Peningkatan kemampuan sumber daya manuasi dan penguatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3)
3.			PROGRAM PENANGANAN WARGA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
	1.		Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal
		1.	Fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Kabupaten Kota untuk dipulangkan ke Desa / Kelurahan Asal
4.			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
	1.		Rehabilitasi Sosial dasar penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial
		1.	Penyediaan Permakanan
		2.	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar serta gelandang pengemis dan masyarakat
		3.	Pemberian Layanan Rujukan
5.			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
	1.		Pemeliharaan Anak-anak Terlantar
		1.	Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar
	2.		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
		1.	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
		2.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
		3.	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
		4.	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
6.			PROGRAM PENANGANAN BENCANA
	1.		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
		1.	Penyediaan Makanan
		2.	Penyediaan Sandang
	2.		Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota
		1.	Koordinasi sosialisasi dan pelaksanaan kampung siaga bencana
		2.	Koordinasi, Sosilaisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
7.			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
	1.		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
		1.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
8.			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
	1.		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintahan kewenangan Kabupaten/Kota
		1.	Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG
	2.		Pemberdayaan perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kabupaten/Kota

		1.	Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi
		2.	Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik hukum sosial dan ekonomi
	3.		Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota
		1.	Advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota
		2.	Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/kota
		3.	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota
9.			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
	1.		Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan linkup daerah Kabupaten/Kota
		1.	Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota
	2.		Penyediaan layanan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota
		1.	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota
	3.		Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota
		1.	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota
10.			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
	1.		Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota
		1.	Penyediaan data gender dan anak di kewenangan kabupaten/kota
11.			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
	1.		Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha kewenangan Kabupaten/Kota
		1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan pemenuhan Hak anak kewenangan kabupaten/kota
	2.		Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota
		1.	Penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota
		2.	Pengembangan komunikasi, informasi dan Edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah Kabupaten/Kota
12.			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
	1.		Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten/Kota
		1.	Koordinasi dan Sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan Kabupaten/Kota
	2.		Penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota
		1.	Penyedia layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah Kabupaten/Kota
		2.	Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten/Kota
		3.	Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi anak yang memerlukan

			perlindungan khusus kewenangan Kabupaten/Kota
		4.	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten/Kota
13.			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
	1.		Pemaduan dan Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
		1.	Penyerasian kebijakan pembangunan daerah Kabupaten/Kota terhadap kependudukan , keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)
		2.	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota
		3.	Penguatan kerjasama pelaksana pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal
	2.		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
		1.	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk memperkuat integrasi Program KKBPK di Sektor lain.
		2.	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
		3.	Pengelolaan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
		4.	Pembinaan dan pengawasan pencatatan dan pelaporan program KKBPK
14.			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
	1.		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal
		1.	Advokasi Program KKBPK Kepada Steakholder dan Mitra Kerja
		2.	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai kearifan Budaya Lokal
		3.	Promosi dan KIE Program KKBPK melalui media masa cetak dan elektronik serta media luar ruang
		4.	Pelaksanaan mekanisme operasional program KKBPK melalui rapat koordinasi kecamatan (Rakorcam), rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan mini lokakarya (Minilok)
		5.	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK
		6.	Pengendalian Program KKBPK
	2.		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
		1.	Penggerakan Kader Instituisi Masyarakat Pedesaan (IMP)
	3.		Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
		1.	Pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya
		2.	Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontasepsi jangka pangjang (MKJP)
		3.	Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB
		4.	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya.
	4.		Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB
		1.	Penguatan peran serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber-KB
		2.	Pelaksanaan dan Pengelolaan program KKBPK di Kampung KB
15.			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA

			(KS)
	1.		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
		1.	Pembentukan kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan konseling remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) dan pemberdayaan ekonomi keluarga
		2.	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan pelaksana (kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
		3.	Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (menjadi orang tua hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta pengelolaan keuangan
	2.		Pelaksanaan dan peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan tingkat daerah Kabuapten/Kota dalam pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
		1.	Pendayagunaan Mitra kerja dan Organisasi kemasyarakatan dalam penggerakan operasional pembinaan program ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk mewujudkan visi dan misi maka harus dipilih strategi yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja. Strategi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian Visi dan Misi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional/kegiatan nyata dari suatu rencana Strategis yang berturut-turut diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, misi dan visi.

Program dan Kegiatan berdasarkan urusan yang ditangani Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
    1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
        a. Penyusunan Dokume Perencanaan Perangkat Daerah
        b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
        c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
        d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
        e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

f. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
g. Evaluasi Kinerja Perangkat Derah

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/verifikasi keuangan SKPD
d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD
e. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Akhir tahun SKPD
f. Pengelolaan dan Penyiapan bahan Tanggapan Pemeriksaan
g. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD
h. Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran

3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
a. Penyusunan perencanaan kebutuhan Barang milik daerah SKPD
b. Pengamanan Barang milik daerah
c. Penatausahaan barang milik Daerah

4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
a. Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian
b. Koordinasi dan pelaksanaan system informasi kepegawaian
c. Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai
d. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi

5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
b. Penyediaan peralatan dan perlengkapankan kantor
c. Penyediaan bahan logistic kantor
d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
e. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
f. Penyediaan bahan/materian
g. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
h. Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD
i. Dukungan pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD

6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
a. Pengadaan kendaraan Dinasoperasional dan lapangan

b. Pengadaan Mebel

7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a. Penyediaan jasa surat menyurat
   b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
   c. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
   b. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
   c. Pemeliharaan rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya.

2. Program Pemberdayaan Sosial
   1) Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah Kabupaten/Kota
      a. Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan Kabupaten/Kota
      b. Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota.
3. Program Penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan
   1) Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke desa/keluarahan asal.
      a. Fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal.
4. Program Rehabilitasi Sosial
   1) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti sosial
      a. Penyediaan permakanan
      b. Penyediaan sandang
      c. Penyediaan alat bantu
      d. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga
      e. Pemberianbimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial
      f. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat.

g. Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah dan kartu identitas anak.
h. Pemberian akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar.
i. Pemberian layanan data dan pengaduan
j. Pemberian layanan kedaruratan
k. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga
l. Pemberian layanan rujukan.

2) Rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti sosial.
a. Pemberian layanan data dan pengaduan
b. Penyediaan alat bantu
c. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA

5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
1) Pemeliharaan anak-anak terlantar
a. Penjangkauan anak-anak terlantar
b. Rujukan anak-anak terlantar
c. Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar
2) Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah Kabupaten/Kota
a. Pendataan fakir miskin cakupan Daerah Kabupaten/Kota
b. Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota
c. Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga
d. Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat.

6. Program Penangan Bencana
1) Perlindungan sosial korban bencana alam sosial Kabupaten/Kota
a. Penyediaan Makanan
b. Penyediaan sandang
c. Penyediaan tempat penampungan pengungsi
d. Penanganan khusus bagi kelompok rentan
e. Pelayanan dukungan psikososial

7. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
1) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
a. Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional Kabupaten/Kota.

8. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

1) Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
    a. Advokasi kebijakan dan pendampingan pelakasanaan PUG termasuk PPRG
2) Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kabupaten/Kota
    a. Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi
    b. Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi.
3) Penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota
    a. Advokasi kebijakan dan pendampingan kepada Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota
    b. Peningkatan kapasitas sumber daya Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota.
    c. Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota.

9. Program Perlindungan Perempuan
    1) Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup Daerah Kabupaten/Kota.
        a. Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota.
    2) Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan Kabupaten/Kota.
        a. Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota.
    3) Penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah Kabupaten/Kota
        a. Penyediaan kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus kewenangan Kabupaten/Kota.
10. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
    1) Penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan haka nak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota.

a. Peningkatan kapasitas sumber daya Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah kabupaten/kota.

11. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
    1) Pengumpulan pengolahan Analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota.
        a. Penyediaan data gender dan anak di kewenangan kabupaten/kota.
12. Program Pemenuhan Hak Anak
    1) Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
        a. Koordinasi dan Sinkronisasi pelembagaan pemenuhan haka nak kewenangan kabupaten/kota.
    2) Penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota.
        a. Penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota.
        b. Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota.
        c. Penguatan jejaring antar Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota.
13. Program Perlindungan Khusus Anak
    1) Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota.
        a. Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota.
        b. Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota.
    2) Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota.
        a. Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota.
        b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota.

c. Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota.
d. Penguatan jejaring antar Lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlidnungan khusus kewenangan Kabupaten/Kota.

14. Program Pengendalian Penduduk
    1) Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk.
        a. Penyerasian kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)
        b. Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota.
        c. Penguatan kerja sama pelaksanaan Pendidikan kependudukan jalur Pendidikan formal.
    2) Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk capaian daerah Kabupaten/Kota.
        a. Membentuk rumah data kependudukan di Kampung KB untuk memperkuat integrasi program KKBPK disektor lain.
        b. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan system informasi keluarga
        c. Pencatatan dan pengumpulan data keluarga.
        d. Pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB.
        e. Pembinaan dan pengawasan pencatatan dan pelaporan program KKBPK
15. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
    1) Pelaksanaan Advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal
        a. Advokasi program KKBPK kepada Stakeholders dan mitra kerja
        b. Promosi dan KIE program KKBPK melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang
        c. Pelaksanaan mekanisme operasional program KKBPK melalui rapat koordinasi kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini lokakarya (Minilok).
        d. Pengelolaan operasional dan sarana di Balai penyuluhan KKBPK
        e. Pengendalian program KKBPK

2) Pendayagunaan tenaga penyuluh KB /petugas lapangan KB (PKB/PLKB)
   a. Penggerakan kader institusi masyarakat pedesaan (IMP)
3) Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kabupaten/kota
   a. Pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya.
   b. Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka Panjang (MKJP)
   c. Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB
   d. Pembinaan pelayanan keluarga berencana dan Kesehatan reproduksi di fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya.
4) Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kebupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber-KB
   a. Penguatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber-KB
   b. Integrasi pembanugnan lintas sector di Kampung KB
   c. Pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK di kampung KB

16. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
1) Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
   a. Pembentukan kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga (Bina keluarga balita (BKB), bina keluarga remaja (BKR), pusat informasi dan konseling remaja (PIK-R), bina keluarga lansia (BKL), Unit peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) dan pemberdayaan ekonomi keluarga.
   b. Pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga /UPPKS).
   c. Penyediaan biaya operasional bagi pengelolaan dan pelaksana kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga / UPPKS)

d. Penyediaan biaya operasional bagi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga /PPKS).
e. Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/PPKS)

2) Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan kesejahteraan keluarga.\
   a. Pendayagunaan mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan dalam penggerakan operasional pembinaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS).

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial, Pembedayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Sanggau

Nama Perangkat Daerah : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. SANGGAU

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					DINSOSP3AKB KAB. SANGGAU				**25.817.538.513**				**26.994.624.008**
1	06				Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	OUTPUT			**14.526.444.581**				**15.968.431.273**
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan bidang urusan Sosial, Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana**		**100%**	**6.396.342.001**			**100%**	**7.571.769.271**
1	**06**	**01**	**2.01**		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun**		**12 Dokumen**	**69.616.747**			**12 Dokumen**	**74.621.178**
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Sanggau	2 Dokumen	9.336.060	DAU		2 Dokumen	10.451.280
1	06	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab.Sanggau	1 Dokumen	27.576.247	DAU		1 Dokumen	30.326.835
1	06	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab.Sanggau	1 Dokumen	6.980.160	DAU		1 Dokumen	5.754.735
1	06	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab.Sanggau	1 Dokumen	5.111.040	DAU		1 Dokumen	6.300.210
1	06	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab.Sanggau	1 Dokumen	4.348.980	DAU		1 Dokumen	6.300.210
1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Sanggau	2 Laporan	6.810.330	DAU		2 Laporan	6.033.978

1	06	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Sanggau	4 Laporan	9.453.930	DAU		4 Laporan	9.453.930
1	**06**	**01**	**2.02**		**Administrasi dan Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun dan diverifikasi**		**30 Dokumen**	**4.761.478.366**				**5.960.535.299**
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Sanggau	38 Orang	2.774.138.431	DAU		38 Orang	3.569.760.156
1	06	01	2.02	02	Penyedia Administrasi Pelaksana tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab.Sanggau	12 Dokumen	1.764.474.311	DAU		12 Dokumen	2.081.237.558
1	06	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab.Sanggau	1 Dokumen	170.006.045	DAU		1 Dokumen	223.061.265
1	06	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab.Sanggau	1 Dokumen	37.699.554	DAU		1 Dokumen	62.458.935
1	06	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab.Sanggau	1 Laporan	3.035.295	DAU		1 Laporan	5.684.910
1	06	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kab.Sanggau	1 Dokumen	2.748.582	DAU		1 Dokumen	4.076.520
1	06	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab.Sanggau	12 Laporan	5.935.703	DAU		12 Laporan	7.727.055
1	06	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab.Sanggau	2 Dokumen	3.440.445	DAU		2 Dokumen	6.528.900
1	**06**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Barang Milik yang disusun**		**7 Dokumen**	**31.615.354**				**38.401.650**
1	06	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab.Sanggau	2 Dokumen	6.280.424	DAU		2 Dokumen	5.230.890
1	06	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab.Sanggau	2 Dokumen	8.534.930	DAU		2 Dokumen	5.889.870
1	06	01	2.03	06	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab.Sanggau	3 Laporan	16.800.000	DAU		3 Laporan	27.280.890
1	**06**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian yang disusun**		**5 Dokumen**	**143.811.522**			**5 Dokumen**	**148.883.365**

1	06	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab.Sanggau	63 paket	44.100.000	DAU		63 paket	49.612.500
1	06	01	2.05	03	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab.Sanggau	2 Dok	5.357.393	DAU		2 Dok	3.198.930
1	06	01	2.05	04	Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab.Sanggau	2 Dok	6.296.060	DAU		2 Dok	6.419.805
1	06	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab.Sanggau	1 Dok	4.282.069	DAU		1 Dok	4.652.130
1	06	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab.Sanggau	16 Orang	77.776.000	DAU		16 Orang	80.000.000
1	06	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kab.Sanggau	35 Orang	6.000.000	DAU		35 Orang	5.000.000
1	**06**	**01**	**2.06**		**ADMNISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**Jumlah Layanan Administrasi Umum yang disediakan**		**10 Jenis**	**522.206.749**			**10 Jenis**	**481.714.516**
1	06	01	2.06	01	Penyedian Komponen Instlasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab.Sanggau	5 paket	8.500.000	DAU		5 paket	6.119.916
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab.Sanggau	10 Paket	170.000.000	DAU		10 Paket	115.853.000
1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kab.Sanggau	12 Paket	45.431.980	DAU		12 Paket	72.795.000
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab.Sanggau	8 Paket	29.035.513	DAU		8 Paket	30.000.000
1	06	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab.Sanggau	1095 Dokumen	9.088.000	DAU		1095 Dokumen	9.996.800
1	06	01	2.06	07	Penyediaan bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab.Sanggau	12 Paket	48.594.800	DAU		12 Paket	71.104.000
1	06	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab.Sanggau	12 Laporan	6.000.000	DAU		12 Laporan	3.500.000
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Sanggau	192 Laporan	195.000.000	DAU		192 Laporan	165.000.000
1	06	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab.Sanggau	5 Dokumen	5.345.494	DAU		5 Dokumen	5.345.800

1	06	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab.Sanggau	1 Dokumen	5.210.962	DAU		1 Dokumen	2.000.000
1	**06**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Dokuemn Pengadaan Barang Milik Daerah yang disusun**		**13 Unit**	**283.800.000**			**13 Unit**	**283.800.000**
1	06	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab.Sanggau	1 Unit	163.800.000	DAU		1 Unit	163.800.000
1	06	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab.Sanggau	9 unit	120.000.000	DAU		9 unit	120.000.000
1	**06**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah layanan administrasi umum yang disediakan**		**3 Jenis**	**276.029.320**			**3 Jenis**	**276.029.320**
1	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab.Sanggau	256 Laporan	2.472.000	DAU		256 Laporan	2.472.000
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab.Sanggau	12 Laporan	150.000.000	DAU		12 Laporan	150.000.000
1	06	01	2.08	04	Penyedian Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab.Sanggau	12 Laporan	123.557.320	DAU		12 Laporan	123.557.320
1	**06**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Layanan Administrasi Umum yang disediakan**		**50 Unit**	**307.783.943**			**3 Jenis**	**307.783.943**
1	06	01	2.09	02	Penyedian Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab.Sanggau	10 Unit	178.000.000	DAU		10 Unit	178.000.000
1	06	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab.Sanggau	40 Unit	29.600.000	DAU		94 Unit	29.600.000
1	06	01	2.09	09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab.Sanggau	1 Unit	100.183.943	DAU		1 Unit	100.183.943
					BIDANG SOSIAL				**8.130.102.580**				**8.396.662.002**
1	**06**	**02**			**PROGRAM PEMBEREDAYAAN SOSIAL**	**Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang mendapat pembinaan**		**100%**	**354.356.705**				**354.356.705**
1	**06**	**02**	**2.03**		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota**	**Jumlah lembaga sosial yang ada di Kabupaten Sanggau yang mendapat pembinaan**		**4 Lembaga**	**354.356.705**			**4 Lembaga**	**354.356.705**

1	06	02	2.03	02	Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Sanggau	16 Orang	142.124.955	DAU		16 Orang	142.124.955
1	06	02	2.03	04	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Sanggau	4 Lembaga	132.231.750	DAU		4 Lembaga	132.231.750
1	06	02	2.03	05	Peningkatan kemampuan sumber daya manuasi dan penguatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Sanggau	1 Sertifikat	80.000.000	DAU		1 Sertifikat	80.000.000
1	**06**	**03**			**PROGRAM PENANGANAN WARGA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	**Persentase Warga Negara Migran yang difasilitasi**		**100%**	**31.420.076**				**35.000.000**
1	**06**	**03**	**2.01**		**Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal**	**Jumlah Dokumen Pemulangan Warga Negara Migran yang terfasilitasi**		**1 Dokumen**	31.420.076			**DAU**	**35.000.000**
1	06	03	2.01	01	Fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Kabupaten Kota untuk dipulangkan ke Desa / Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan	Kab.Sanggau	200 Orang	31.420.076	DAU		200 Orang	35.000.000
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase PMKS Yang tertangani**		**100%**	**2.754.252.876**				**2.754.253.158**
1	**06**	**04**	**2.01**		**Rehabilitasi Sosial dasar penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial**	**Jumlah PMKS yang tertangani**		**795 Orang**	**2.735.947.418**			**795 Orang**	**2.735.947.700**
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Sanggau	471 Orang	1.037.728.981	DAU		425 Orang	1.037.728.981
1	06	04	2.01	06	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan Kabupaten/Kota.	Kab.Sanggau	471 Orang	49.999.727	DAU		560 Orang	50.000.009

1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang mendapatkan Alat Bantu Peraga sesuai Kebetuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Sanggau	20 Orang	50.000.064	DAU		20 Orang	50.000.064
1	06	04	2.01	04	Pemberian Layanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Sanggau	30 Orang	19.999.993	DAU		30 Orang	19.999.993
1	06	04	2.01	05	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Sanggau	250 Orang	9.999.982	DAU		250 Orang	9.999.982
1	06	04	2.01	06	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar serta gelandangan pengemis dan masyarakat.	Jumlah peserta bimbingan sosial kepada keluarga penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota.	Kab.Sanggau	560 Orang	1.191.218.922	DAU		560 Orang	1.191.218.922
1	06	04	2.01	07	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Indentitas Anak bagi penyandang Disabilitas kewenangan Kabupaten/Kota,	Kab.Sanggau	20 Orang	15.000.053	DAU		20 Orang	15.000.053
1	06	04	2.01	08	Pemberian Akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah orang yang mendapatkan Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Sanggau	141 Orang	19.999.786	DAU		141 Orang	19.999.786
1	06	04	2.01	09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab.Sanggau	560 Orang	20.000.094	DAU		560 Orang	20.000.094
1	06	04	2.01	10	Pemberian layanan kedaruratan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Sanggau	10 Orang	59.999.854	DAU		10 Orang	59.999.854
1	06	04	2.01	11	Pemberian pelayanan penelurusan keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Sanggau	75 Orang	9.999.943	DAU		75 Orang	9.999.943
1	06	04	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Sanggau	370 Orang	252.000.019	DAU		370 Orang	252.000.019
1	06	04	2.02		**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**				**18.305.458**				**18.305.458**
1	06	04	2.02	01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab.Sanggau	50 Orang	4.300.010	DAU		50 Orang	4.300.010
1	06	04	2.02	05	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang mendapatkan Alat Bantu Peraga sesuai Kebetuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Sanggau	50 Orang	9.605.255	DAU		50 Orang	9.605.255

1	06	04	2.02	08	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Sanggau	50 Orang	4.400.193	DAU		50 Orang	4.400.193
1	**06**	**05**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase Bantuan Sosial yang diberikan kepada masyarakat**		**90%**	**4.477.093.707**			**9 Panti**	**4.477.093.707**
1	**06**	**05**	**2.01**		**Pemeliharaan Anak-anak Terlantar**	**Jumlah Panti Asuhan yang mendapatkan Bantuan**		**628 Orang**	**177.093.707**			**9 Panti**	**177.093.707**
1	06	05	2.01	01	Penjangkauan Anak-anak Terlantar	Jumlah Anak-anak terlantar yang dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Sanggau	10 Orang	6.999.661	DAU		10 Orang	6.999.661
1	06	05	2.01	02	Rujukan Anak-anak Terlantar	Jumlah Anak-anak terlantar yang mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Sanggau	10 Orang	4.999.700	DAU		10 Orang	4.999.700
1	06	05	2.01	03	Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Sanggau	608 Orang	165.094.346	DAU		607 Orang	165.094.346
1	**06**	**05**	**2.02**		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Data Kemiskinan yang disusun**		**2 Dokumen**	**4.300.000.000**			**2 Dokumen**	**4.300.000.000**
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Kab.Sanggau	150.000 Orang	1.000.000.000	DAU		150.000 Orang	1.000.000.000
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Kab.Sanggau	49.957 Keluarga	300.000.000	DAU		49.957 Keluarga	300.000.000
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Sanggau	145.985 Keluarga	2.000.000.000	DAU		145985 Keluarga	2.000.000.000
1	06	05	2.02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Sanggau	50 Orang	1.000.000.000	DAU		50 Orang	1.000.000.000
1	**06**	**06**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan Bantuan**		**100 %**	**262.979.216**				**525.958.432**
1	**06**	**06**	**2.01**		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Jumlah penerima bantuan bencana alam/sosial yang menerima makanan yang disediakan**		**150 Orang**	**262.979.216**			**150 Orang**	**262.979.216**

1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah penerima bantuan bencana alam/sosial yang menerima makanan yang disediakan	Kab.Sanggau	300 Orang	110.930.930	DAU		75 Orang	110.930.930
1	06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah penerima bantuan bencana alam/sosial yang menerima makanan yang disediakan	Kab.Sanggau	300 Orang	30.003.866	DAU		75 Orang	30.003.866
1	06	06	2.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Sanggau	15 Unit	62.805.215	DAU		15 Unit	62.805.215
1	06	06	2.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Sanggau	300 Orang	24.376.905	DAU		115 Orang	24.376.905
1	06	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Sanggau	300 Orang	34.862.300	DAU		115 Orang	34.862.300
1	**06**	**07**			**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**			**100%**	**250.000.000**				**250.000.000**
1	**06**	**07**	**2.01**		**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang di pelihara**		**3 TMP**	**250.000.000**			**3 TMP**	**250.000.000**
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab.Sanggau	3 TMP	250.000.000	DAU		3 TMP	250.000.000
2	**08**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				**3.562.605.267**				**3.378.070.459**
2	**08**	**02**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase Dokumen Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan yang disusun**		**100%**	**2.461.782.613**				**2.461.782.613**
2	**08**	**02**	**2.01**		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintahan kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen penyusunan indikator APE**		**28 Perangkat Daerah**	**96.186.108**			**28 Perangkat Daerah**	**96.186.108**
2	08	02	2.01	03	Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Sanggau	28 Perangkat Daerah	96.186.108	DAU		28 Perangkat Daerah	96.186.108
2	**08**	**02**	**2.02**		**Pemberdayaan perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Pembinaan terhadap Kaum Perempuan yang disusun**		**4 Dokumen**	**143.885.448**			**4 Dokumen**	**143.885.448**

2	08	02	2.02	01	Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Sanggau	1 Dokumen	55.192.988	DAU		1 Dokumen	55.192.988
2	08	02	2.02	02	Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik hukum sosial dan ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Sanggau	2 Organisasi	88.692.460	DAU		2 Organisasi	88.692.460
2	**08**	**02**	**2.03**		**Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota**	**Jumlah Dokumen Penguatan dan Pengembangan Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang disusun**		**4 Dokumen**	**2.221.711.057**			**4 Dokumen**	**2.221.711.057**
2	08	02	2.03	01	Advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Kab.Sanggau	31 Lembaga	2.135.294.076	DAU		31 Lembaga	2.135.294.076
2	08	02	2.03	02	Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Kab.Sanggau	200 Orang	31.336.993	DAU		200 Orang	31.336.993
2	08	02	2.03	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab.Sanggau	2 Dokumen	55.079.988	DAU		2 Dokumen	55.079.988
2	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani**		**100%**	**379.052.424**				**379.052.424**
2	**08**	**03**	**2.01**		**Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan linkup daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani**		3 Perangkat Daerah	**80.119.115**	DAU		3 Perangkat Daerah	**80.119.115**
2	08	03	2.01	02	Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Sanggau	3 Perangkat Daerah	80.119.115	DAU		3 Perangkat Daerah	80.119.115
2	**08**	**03**	**2.02**		**Penyediaan layanan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota**	**Jumlah kasus terhadap perempuan yang tertangani**	Kab.Sanggau	25 Orang	**130.000.000**	DAU		25 Orang	**130.000.000**

2	08	03	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Korban kekerasan tingkat Kabupaten/Kota yang mendapat layanan pengaduan	Kab.Sanggau	25 Orang	130.000.000	DAU		25 Orang	130.000.000
2	**08**	**03**	**2.03**		**Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota**	**Jumlah Dokumen kesepakatan bersama antar jejaring yang disepakati**		**1 Dokumen**	**168.933.309**			**1 Dokumen**	**168.933.309**
2	08	03	2.03	03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Kab.Sanggau	100 Orang	100.000.000	DAU		100 Orang	100.000.000
2	08	03	2.03	04	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Sanggau	1 Dokumen	68.933.309	DAU		1 Dokumen	68.933.309
2	**08**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Persentase Dokumen Data Gender dan Anak tersusun dengan baik**		**100 %**	**141.272.112**				**141.272.112**
2	**08**	**05**	**2.01**		**Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota**	**Jumlah Dokumen pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak yang disusun**		2 Dokumen	**141.272.112**			2 Dokumen	**141.272.112**
2	08	05	2.01	01	Penyediaan data gender dan anak di kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang tersedia	Kab.Sanggau	2 Dokumen	81.272.112	DAU		2 Dokumen	81.272.112
2	08	05	2.01	02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Sanggau	1 Dokumen	60.000.000	DAU		1 Dokumen	60.000.000
2	**08**	**06**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Persentase Dokumen Kabupaten Layak Anak yang tersusun dengan baik**		**70%**	**336.000.000**				**336.000.000**
2	**08**	**06**	**2.01**		**Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Pencapaian Indikator Kabupaten Layak anak yang disusun**		**1 Dokumen**	**100.000.000**			**1 Dokumen**	**100.000.000**
2	08	06	2.01	01	Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan Hak anak pada lembaga pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintahan, Non Pemerintahan, Media dan Dunia Usaha yang mendapat Advokasi kebijakan dan pendampingan Pemenuhan Haka Anak pada organisasi Pemerintahan, Non Pemerintahan Media dan Dunia Usaha	Kab.Sanggau	47 Organisasi	35.000.000	DAU		47 Organisasi	35.000.000

2	08	06	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan pemenuhan Hak anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Pencapaian Indikator Kabupaten Layak anak yang disusun	Kab.Sanggau	1 Dokumen	65.000.000	DAU		1 Dokumen	65.000.000
2	**08**	**06**	**2.02**		**Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Lembaga Penyedia layanan Kualitas hidup anak yang tersedia**		**33 Lembaga**	**236.000.000**			**33 Lembaga**	**236.000.000**
2	08	06	2.02	01	Penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan yang mendukung peringatan dalam pengembangan kualitas hidup anak	Kab.Sanggau	360 Orang	36.000.000	DAU		360 Orang	36.000.000
2	08	06	2.02	03	Pengembangan komunikasi, informasi dan Edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta forum anak daerah tingkat Kabupaten, kecamatan, Desa/Kelurahan yang dibina	Kab.Sanggau	1 Dokumen	95.000.000	DAU		1 Dokumen	95.000.000
2	08	06	2.02	04	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil penguatan jejaring antar Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas Hidup anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Sanggau	1 Dokumen	105.000.000	DAU		1 Dokumen	105.000.000
2	**08**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase kasus kekerasan anak tertangani**		**100%**	**244.498.118**				**59.963.310**
2	**08**	**07**	**2.01**		**Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Sanggau	1 Dokumen	**59.963.310**	DAU		1 Dokumen	**59.963.310**
2	08	07	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Sanggau	1 Dokumen	59.963.310	DAU		1 Dokumen	59.963.310
2	**08**	**07**	**2.02**		**Penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota**	**Jumlah Dokumen Layanan bagi anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang disusun**		**2 Dokumen**	**184.534.808**			**2 Dokumen**	**184.534.808**
2	08	07	2.02	01	Penyedia layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Sanggau	12 Orang	75.000.000	DAU		12 Orang	75.000.000
2	08	07	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Sanggau	Layanan	40.882.538	DAU		Layanan	40.882.538

2	08	07	2.02	03	Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Sanggau	Masyarakat	63.532.070	DAU		Masyarakat	63.532.070
2	08	07	2.02	04	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memelukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Sanggau	2 Dokumen	5.120.200	DAU		2 Dokumen	5.120.200
2	**14**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				**7.728.488.665**				**7.648.122.276**
2	**14**	**02**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Total Fertility Rate (TFR)**		**2.22 point**	**442.189.510**				**441.823.121**
2	**14**	**02**	**2.01**		**Pemaduan dan Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**Jumlah Dokumen Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah yang tersusun dengan baik**		**3 Dokumen**	**60.024.460**			**3 Dokumen**	**60.024.460**
2	14	02	2.01	01	Penyerasian kebijakan pembangunan daerah Kabupaten/Kota terhadap kependudukan , keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan keluarga Berencana)	Kab.Sanggau	2 Dokumen	4.875.000	DAU		2 Dokumen	4.875.000
2	14	02	2.01	02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten / Kota	Kab.Sanggau	1 Dokumen	44.839.140	DAU		1 Dokumen	44.839.140
2	14	02	2.01	05	Penguatan kerjasama pelaksana pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Kab.Sanggau	1 Dokumen	10.310.320	DAU		1 Dokumen	10.310.320
2	**14**	**02**	**2.02**		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Pemetaan Pengendalian Penduduk**		**2 Dokumen**	**382.165.050**			**2 Dokumen**	**381.798.661**
2	14	02	2.02	08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk memperkuat integrasi Program KKBPK di Sektor lain.	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor lain yang dibentuk.	Kab.Sanggau	2 Unit	2.025.000	DAU		2 Unit	2.025.000

2	14	02	2.02	09	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sistem informasi keluarga	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sistem informasi keluarga	Kab.Sanggau	1 Laporan	64.199.421	DAU		1 Laporan	64.199.421
2	14	02	2.01	12	Pencatatan dan pengumpulan data keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang tersedia	Kab.Sanggau	2 Dokumen	141.000.000	DAU		2 Dokumen	141.000.000
2	14	02	2.01	13	Pengelolaan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kab.Sanggau	2 Dokumen	174.574.240	DAU		2 Dokumen	174.574.240
2	14	02	2.01	14	Pembinaan dan pengawasan pencatatan dan pelaporan program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	Kab.Sanggau	1 Laporan	366.389	DAU		1 Laporan	366.389
2	**14**	**03**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Persentase pasangan usia subur (PUS) menjadi peserta kb aktif**		**71,23%**	**5.391.413.130**				**5.311.413.130**
2	**14**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal**	**Jumlah Dokumen Advokasi KIE Pengendalian Penduduk dan KB**		**6 Dokumen**	**1.267.384.936**			**6 Dokumen**	**1.187.384.936**
2	14	03	2.01	01	Advokasi Program KKBPK Kepada Steakholder dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kab.Sanggau	4 Organisasi	119.999.668	DAU		4 Organisasi	119.999.668
2	14	03	2.01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK melalui media masa cetak dan elektronik serta media luar ruang	Jumlah penyuluhan promosi KIE program KKBPK melalui media masa cetak dan elektronik serta media luar ruang	Kab.Sanggau	6 Unit	150.006.510	DAU		6 Unit	150.006.510
2	14	03	2.01	06	Pelaksanaan mekanisme operasional program KKBPK melalui rapat koordinasi kecamatan (Rakorcam), rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan mini lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kab.Sanggau	1 Laporan	195.130.000	DAU		1 Laporan	195.130.000
2	14	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana	Kab.Sanggau	1 Laporan	722.248.758	DAU		1 Laporan	722.248.758
2	14	03	2.01	08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBP	Kab.Sanggau	1 Laporan	80.000.000	DAU		1 Laporan	80.000.000
2	**14**	**03**	**2.02**		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Jumlah Kader IMP yang dibina**		**15 Orang**	**1.370.200.000**			**15 Orang**	**1.370.200.000**

2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Instituisi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kab.Sanggau	15 Orang	1.370.200.000	DAU		15 Orang	1.370.200.000
2	**14**	**03**	**2.03**		**Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Faskes yang mendapat pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi**		**33 faskes**	**1.065.920.311**			**33 faskes**	**1.065.920.311**
2	14	03	2.03	01	Pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab.Sanggau	1 Laporan	29.700.000	DAU		1 Laporan	29.700.000
2	14	03	2.03	03	Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontasepsi jangka pangjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kab.Sanggau	12.709 Orang	370.062.311	DAU		12.709 Orang	370.062.311
2	14	03	2.03	06	Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab.Sanggau	15 Unit	497.858.000	DAU & DAK		15 Unit	497.858.000
2	14	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya.	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab.Sanggau	1 Laporan	168.300.000	DAU		1 Laporan	168.300.000
2	**14**	**03**	**2.04**		**Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB**	**Jumlah Dokumen Pelaksanaan dan Pembinaan kesertaan ber KB yang tersusun dengan baik**		**4 Dokumen**	**1.687.907.883**			**4 Dokumen**	**1.687.907.883**
2	14	03	2.04	01	Penguatan peran serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kab.Sanggau	3 Organisasi	35.907.973	DAU		3 Organisasi	35.907.973
2	14	03	2.04	02	Integrasi pembangunan lintas sektor di Kampung KB	Jumlah dokumen hasil Integrasi pembangunan lintas sektor di kampung KB	Kab.Sanggau	2 Dokumen	1.155.999.910	DAU & DAK		2 Dokumen	1.155.999.910
2	14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Kab.Sanggau	15 Kampung KB	496.000.000	DAU & DAK		15 Kampung KB	496.000.000

2	**14**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Cakupan Kelompok Bina Keluarga yang dibina (%)**		**71,04%**	**1.894.886.025**				**1.894.886.025**
2	**14**	**04**	**2.01**		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga**	**Jumlah Kelompok Bina Keluarga yang mendapatkan Pembinaan**		**12 Kelompok**	**1.827.038.723**			**12 Kelompok**	**1.827.038.723**
2	14	04	2.01	01	Pembentukan kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan konseling remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) dan pemberdayaan ekonomi keluarga	Jumlah Kelompok Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kab.Sanggau	12 Kelompok	14.113.953	DAU & DAK		12 Kelompok	14.113.953
2	14	04	2.01	02	Pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	Jumlah unit sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPLS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab.Sanggau	12 Unit	126.000.000	DAU & DAK		12 Unit	126.000.000
2	14	04	2.01	05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan pelaksana (kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/PPKS)	Kab.Sanggau	110 Orang	1.578.100.000	DAU & DAK		110 Orang	1.578.100.000
2	14	04	2.01	06	Penyediaan biaya operasional bagi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	Jumlah kelompok kegiatan ketahanan dan Kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	Kab.Sanggau	12 Kelompok	67.199.984	DAU & DAK		110 Orang	67.199.984
2	14	04	2.01	08	Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (menjadi orang tua hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta pengelolaan keuangan	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Kab.Sanggau	1 Laporan	41.624.786	DAU & DAK		1 Laporan	41.624.786

2	**14**	**04**	**2.02**		**Pelaksanaan dan peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan tingkat daerah Kabuapten/Kota dalam pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Jumlah kader yang mendapatkan Advokasi dari mitra kerja/organisasi kemasyarakatan'**		**60 Orang**	**67.847.302**			**60 Orang**	**67.847.302**
2	14	04	2.02	02	Pendayagunaan mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan dalam penggerakan operasional pembinaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	Jumlah kader yang mendapatkan Advokasi dari mitra kerja/organisasi kemasyarakatan'	Kab.Sanggau	1 Laporan	67.847.302	DAU		1 Laporan	67.847.302

BAB V
P E N U T U P

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau, merupakan dokumen perencanan tahunan yang akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan kinerja selama tahun 2024. Dalam rangka menjamin adanya sinergi perencanaan pembangunan guna menjaga kesinambungan proses perencaan dan untuk mengefektifkan pencapaian pembangunan di Kabupaten Sanggau secara umum Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau secara khusus maka Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau dan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau. Substansi Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana disusun dengan mempedomani Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam rangka meningkatkan keefektifan pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Tahun 2024, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut : 1. Substansi Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau disusun terukur berdasarkan tatalaksana arah kebijakan dalam RKPD Kabupaten Sanggau Tahun 2024 dan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau

2019–2024 2. Tindak lanjut alokasi anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau atas proses Penganggaran yang tidak sesuai dengan dokumen Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, maka akan berpengaruh pada tingkat capaian targetan yang telah ditetapkan. 3. Bidang – bidang dan semua unsur teknis pelaksanan kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, agar segera menyusun rencana kinerja masing–masing dengan mengacu pada jenjang telah ditetapkan. 4. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk setiap program dan kegiatan didasarkan pada Renja yang telah ditetapkan dengan menganut prinsip efektifitas dan efisiensi anggaran. Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Tahun 2024 secara optimal akan didasarkan pada arah kebijakan dalam Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi dalam Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024. Sehingga berimplikasi terhadap mengakselerasi pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Kami berharap, bahwa Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga seluruh target indikator kinerja yang tertuang dalam RPJMD untuk urusan perencanaan pembangunan dapat tercapai. Adapun jika terdapat kendala dalam capaian indikator kinerja tersebut, baik diakibatkan masih belum memadai anggaran dan permasalahan teknis lainnya, dapat dilakukan penajaman dan perbaikan melalui perubahan rencana kerja. Demikian, dokumen Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.